



**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
KECAMATAN TINAMBUNG**

**LAPORAN
AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LAKIP)**

TAHUN 2022



**LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH
(LAKIP)**

**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
KECAMATAN TINAMBUNG**

TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan perkenan Nya sajalah kami dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022. Penyusunan LAKIP dimaksudkan sebagai bentuk tertulis pertanggungjawaban Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 atas pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2022.

LAKIP berisi paparan pencapaian kinerja Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 termasuk gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan program / kegagalan / kebijakan dalam mewujudkan isi, misi, tujuan dan sasaran yang telah dilakukan.

LAKIP ini disusun berdasarkan objektivitas dan validitas data, sehingga diyakini telah memenuhi prinsip – prinsip akuntabilitas yang berlaku dan diharapkan mampu mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean governance).

Akhirnya tidak lupa kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi sehingga dapat diselesaikannya LAKIP ini.

Tinambung, 31 Januari 2023

Camat Tinambung,



Hamzah Ismail, S.Pd.

Pangkat : Pembina

Nip. 19660407 198602 1 007

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	1
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	2
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud Dan Tujuan	5
1.4. Kedudukan, Tugas Dan Fungsi	6
1.5. Isu Strategis	29
1.6. Sistematika Penyajian	32
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1. Rencana Strategis.....	35
2.2. Perjanjian Kinerja	36
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Akuntabilitas Kinerja	40
3.7. Akuntabilitas Keuangan	94
BAB IV PENUTUP	
4.1 Keberhasilan dan Kegagalan Kinerja	98
4.2 Kendala dan Hambatan dalam Pencapaian Kinerja	99
4.3 Strategi Pemecahan Masalah.....	99
LAMPIRAN	
- Perjanjian Kinerja 2022	

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 disusun melalui pengukuran data kinerja setelah berakhirnya Tahun Anggaran 2022. Capaian kinerja diukur dengan membandingkan antara target kinerja yang diperjanjikan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja 2022 dengan hasil Pengukuran Kinerjanya.

Sesuai dengan Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 telah ditetapkan 2 Sasaran Strategis dan 4 Indikator Kinerja yang harus dicapai oleh Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar. Rata-rata capaian kinerja sasaran berdasarkan indikator yang ditetapkan menunjukkan presentase capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 1.1 Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, Target, Realisasi 2022

No	Sasaran Strategis dan Indikator	Target	Capaian	%
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Kecamatan	Sangat Baik (100)	Sangat Baik (90)	90
	Indeks Kepuasan Layanan Pemerintahan Kecamatan			
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	B (70)	B (70)	100
	Predikat SAKIP Perangkat Daerah			
3	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	100% (WTP)	100% (WTP)	100
	Persentase Tertib Pengolahan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah			
4	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Sangat Baik (100)	Sangat Baik (90)	90
	Indeks Kepuasan Pengguna Pelayanan Publik Perangkat Daerah			
Kinerja Rata-Rata				95,00

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam organisasi pemerintahan, akuntabilitas merupakan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan sasaran strategis instansi yang bersangkutan. Hal ini merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Selanjutnya secara implementatif untuk mengatur hal dimaksud diterbitkan regulasi berupa Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan Kinerja dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Pencapaian tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran rencana strategis, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja, dengan demikian, Laporan Kinerja Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021 menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan organisasi dan telah disusun dan dikembangkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sumber daya manusia di lingkup Kantor Kecamatan Tinambung punya pengaruh penting sebagai faktor kunci

keberhasilan sebuah proses pembangunan. Dalam konteks ke-Indonesiaan, pembangunan manusia Indonesia seutuhnya merupakan salah satu aspek penting dari cita-cita pembangunan nasional keseluruhan, yang dalam pelaksanaannya harus didukung oleh sumber daya manusia yang kuat dan mantap, termasuk didalamnya sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara (ASN).

Kebijakan nasional mutakhir dalam pengelolaan aparatur diarahkan pada terbangunnya aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Melalui Sosialisasi dan pengiriman Aparatur Pemerintah di kegiatan penyelenggaraan Bimbingan Tehnis (Bimtek) oleh Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar bekerja sama dengan Badan Diklat milik pemerintah maupun swasta untuk mendapatkan pembinaan SDM tentang manajemen aparatur sipil Negara yang akan diarahkan pada manajemen modern dan andal untuk menghasilkan Aparatur Sipil Negara yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, sehingga penyelenggaraan Administrasi umum Pemerintahan, Pelaksanaan pembangunan dan pelayanan Masyarakat oleh Aparatur Sipil Negara di Kantor Kecamatan Tinambung mampu menjadi pusat keunggulan (*center of excellence*) dalam membangun dan mengembangkan kompetensi, dedikasi dan integritas Aparatur Sipil Negara. guna mewujudkan idealisme nasional dimaksud berbagai upaya harus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan melalui perencanaan yang berbasis pada kebutuhan aktual dan mampu mengantisipasi berbagai peluang dan tantangan masa depan.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengisyaratkan pentingnya Akuntabilitas dalam Perencanaan anggaran dan pertanggungjawaban anggaran.
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 11 tahun 2009 tentang Organisasi dan tata kerja Kecamatan dan Kelurahan
13. Instruksi Bupati Polewali Mandar No. 41 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja Kantor Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 ini merupakan Laporan Pelaksanaan Kinerja tahun Kedua dari Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar periode Tahun 2019-2024. Maksud disusunnya Laporan Kinerja Kantor Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 ini adalah untuk memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang jelas, transparan, dapat dipertanggungjawabkan, sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/ kegagalan pencapaian target

sasaran dalam kurun waktu Tahun 2022 serta sebagai wujud akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan dari Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022, adalah sebagai :

1. Sarana pertanggungjawaban kinerja SKPD Kecamatan Tinambung dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2022;
2. Bahan penilaian dan evaluasi keberhasilan dalam pencapaian kinerja tahunan, sehingga dapat memperbaiki kinerja organisasi di tahun yang akan datang;
3. Bahan pengambilan keputusan untuk menentukan kebijakan teknis dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan lanjutan;
4. Tolak ukur sinkronisasi antara rencana kerja dan hasil kerja.

1.4 KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

1.4.1. GAMBARAN UMUM WILAYAH

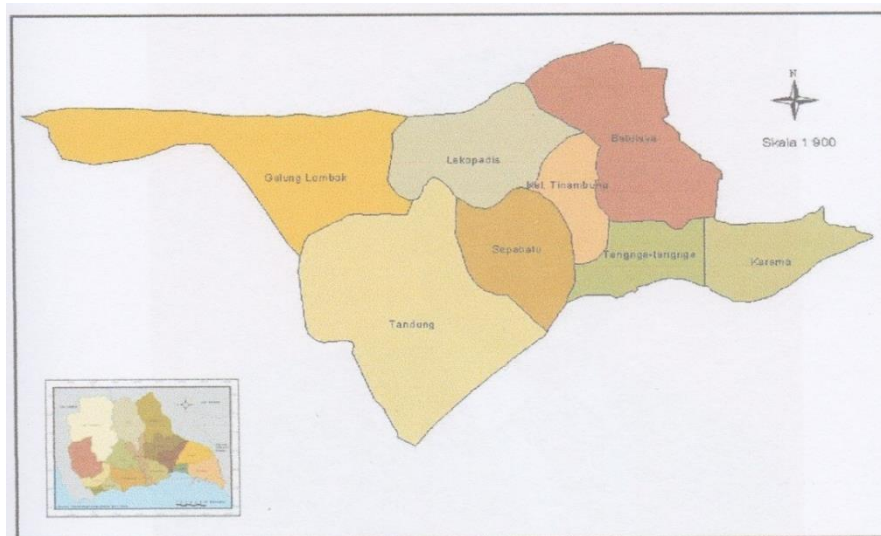
Kecamatan Tinambung merupakan salah satu Kecamatan dari enam belas Kecamatan yang ada di Kabupaten Polewali Mandar. Letak Ibukota Kecamatan Tinambung dengan ibukota Kabupaten yakni sekitar 26 km. Kecamatan Tinambung secara geografis terletak di - Lintang Selatan dan - Bujur Timur.

Kecamatan Tinambung berbatasan :

- ❖ Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Limboro
- ❖ Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Balanipa
- ❖ Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Majene
- ❖ Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Mandar

Luas Kecamatan Tinambung sebesar 21,99 km² meliputi 1 Kelurahan dan 7 Desa. Desa Galung Lombok adalah Desa yang memiliki wilayah terluas di Kecamatan Tinambung yaitu 6,81 km². Sedangkan desa yang paling sempit wilayahnya di Kecamatan Tinambung adalah Kelurahan Tinambung yaitu 0,73 km². Luas Desa di Kecamatan Tinambung sebagai berikut:

- ❖ Kelurahan Tinambung luas daerah : 0,73 km²
- ❖ Desa Batulaya dengan luas daerah : 3,08 km²
- ❖ Desa Lekopadis dengan luas daerah : 1,79 km²
- ❖ Desa Karama dengan luas daerah : 1,70 km²
- ❖ Desa Tangnga-Tangnga dengan luas daerah : 0,79 km²
- ❖ Desa Sepabatu dengan luas daerah : 1,59 km²
- ❖ Desa Tandung dengan luas daerah : 5,50 km²
- ❖ Desa Galung Lombok dengan luas daerah : 6,81 km²

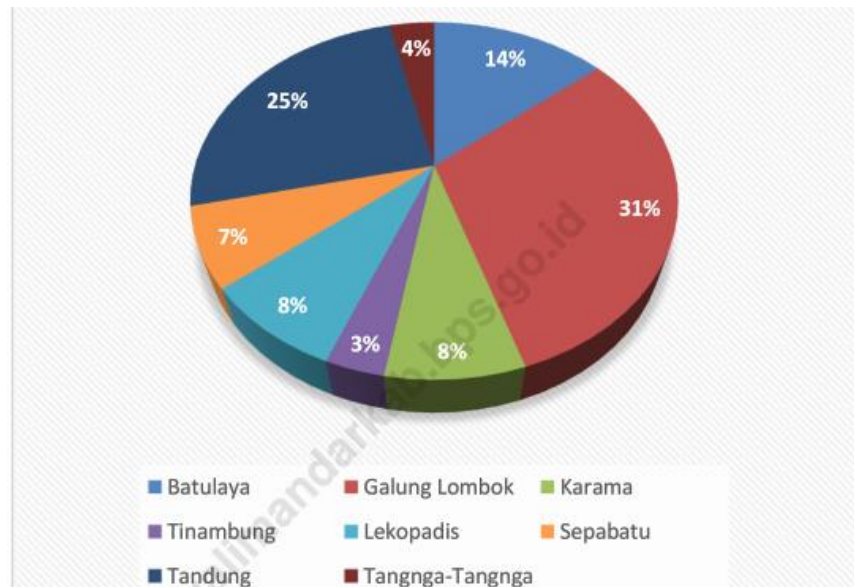


Gambar 1.1

Peta Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar

Sementara itu jika kita lihat secara umum ketinggian Kecamatan Tinambung dari permukaan laut berkisar antara 20 m sampai 100 m dari permukaan air laut, dimana Batulaya merupakan

desa yang memiliki ketinggian paling tinggi dari permukaan laut yaitu setinggi 100 m dari permukaan laut, dan desa yang memiliki ketinggian dari laut terendah adalah Desa Karama dengan ketinggian hanya berkisar 20 m dari permukaan laut.



Gambar 1.2 Luas Wilayah Kecamatan Tinambung Per Desa /Kelurahan dari data Kecamatan Tinambung Dalam Angka 2021

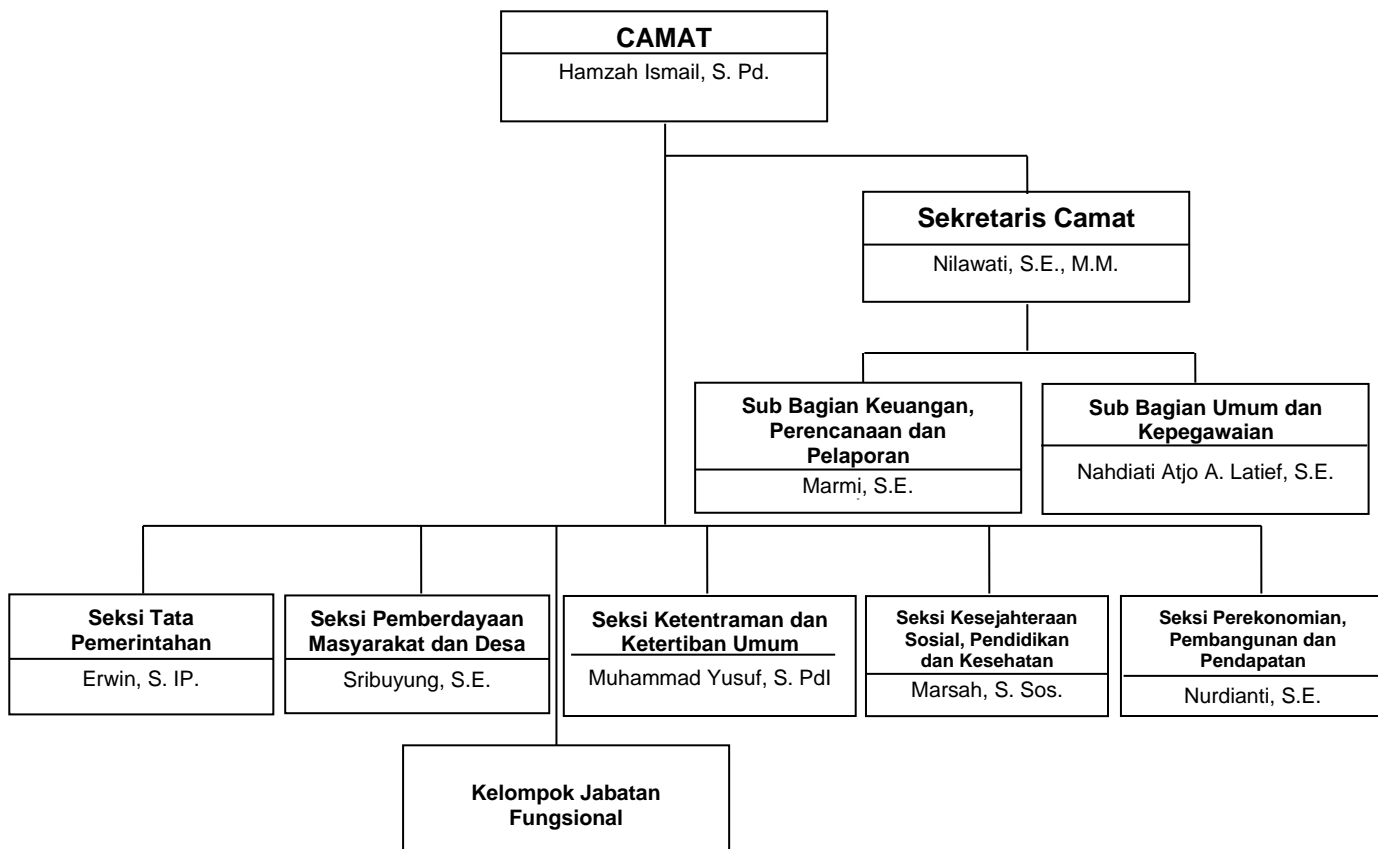
Data Penduduk Kecamatan Tinambung berdasarkan Data BPS Tahun 2020 adalah sebesar 25.187 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 12.339 jiwa, dan perempuan sebanyak 12.484 jiwa dengan jumlah rumah tangga sebanyak 5.251 rumah tangga.

1.4.2. Kondisi Organisasi

Secara operasional, Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar di dukung sumber daya manusia.

Dibawah ini disajikan bagan struktur organisasi Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN TINAMBUNG



Gambar 1.3
Struktur Organisasi Kecamatan Tinambung

Kecamatan adalah Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar yang dipimpin oleh seorang Kepala Kecamatan yang disebut Camat, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Polewali Mandar Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Polewali Mandar, maka Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan

pemerintah umum, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pelaksanaan pelayanan.

I. CAMAT

- I. Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dalam wilayah kecamatan.
- II. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kecamatan menyelenggarakan fungsi :
 - 1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
 - 2) Pengordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - 3) Pengordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - 4) Pengordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - 5) Pengordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - 6) Pengordinasian upaya penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
 - 7) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
 - 8) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di kecamatan; dan
 - 9) Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten. dan /atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan

Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek:

- a. Perizinan;
- b. Rekomendasi;
- c. Koordinasi;
- d. Pembinaan;
- e. Pengawasan;
- f. Fasilitasi;
- g. Penetapan;
- h. Penyelenggaraan;
- i. Kewenangan lain yang dilimpahkan.

Tugas Camat dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat meliputi:

- a. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan ;
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
- c. Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;

- d. Melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. Melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada bupati dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

Tugas Camat dalam mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum meliputi:

- a. Melakukan koordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- b. Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan; dan
- c. Melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Bupati.

Tugas Camat dalam mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan meliputi:

- a. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan;
- b. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang

penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan

- c. Melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada bupati.

Tugas Camat dalam mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum meliputi:

- a. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- b. Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
- c. Melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada bupati.

Tugas Camat dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan meliputi:

- a. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- b. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- c. Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; dan

- d. Melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada Bupati.

Tugas Camat dalam membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan meliputi:

- a. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;
- b. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan;
- c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah;
- d. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan;
- e. Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan; dan
- f. Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan kepada bupati.

Tugas Camat dalam melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan meliputi:

- a. Melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- b. Melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;

- d. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
- e. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada Bupati.

Susunan Organisasi Dan Tata Kerja

- 1) Camat
- 2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan; dan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- 3) Seksi-seksi masing - masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris.
 - a. Seksi Tata Pemerintahan;
 - b. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - c. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - d. Seksi Kesejahteraan Sosial, Pendidikan dan Kesehatan;
 - e. Seksi Perekonomian, Pembangunan dan Pendapatan.
- 4) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Camat.

II. SEKRETARIAT

- 1. Sekretariat kecamatan mempunyai tugas membantu camat dalam melakukan kegiatan penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, perencanaan dan penganggaran. hubungan

kerja dibidang administrasi dengan perangkat daerah terkait dan pengkoordinasian kegiatan di lingkungan kecamatan.

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Kecamatan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan kesekretariatan;
- b. Penyusunan rencana kerja teknis dan operasional kesekretariatan;
- c. Penyelenggaraan administrasi umum dan rumah tangga;
- d. Penyelenggaraan perencanaan dan penganggaran;
- e. Penyelenggaraan pengelolaan perlengkapan dan administrasi aset;
- f. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
- g. Penyelenggaraan administrasi keuangan;
- h. Penyelenggaraan administrasi pelaporan;
- i. Penyelenggaraan koordinasi dan hubungan kerja di bidang administrasi dengan perangkat kerja terkait;
- j. Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, perencanaan dan penganggaran, hubungan kerja di bidang administrasi dengan perangkat daerah terkait dan pengkoordinasian kegiatan di lingkungan kecamatan; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya. Sekretariat membawahkan:

A. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan Dan Pelaporan

- 1) Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas mengendalikan pengelolaan keuangan, perencanaan dan penganggaran serta pelaporan Satuan Kerja.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1), Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:
 - a) Penyusunan petunjuk teknis pengendalian keuangan, perencanaan dan pelaporan;
 - b) Penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengendalian keuangan, perencanaan dan pelaporan;
 - c) Pengendalian pengelolaan keuangan dan perbendaharaan;
 - d) Pengendalian administrasi gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan;
 - e) Pengendalian penyusunan perencanaan strategis;
 - f) Pengendalian penyusunan rencana kerja tahunan;
 - g) Pengendalian penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
 - h) Pengendalian penyusunan Perencanaan Kinerja berjenjang dan rencana aksi kegiatan;
 - i) Pengendalian pemantauan dan evaluasi serta pelaporan program dan kegiatan serta pengukuran kinerja unit;

- j) Pengendalian administrasi pelaporan keuangan berkala, semesteran dan akhir tahun;
- k) Pengendalian penyusunan laporan akuntabilitas kinerja;
- l) Pengendalian penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah kecamatan; dan
- m) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. Bagian Umum dan Kepegawaian

- 1) mempunyai tugas mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan tata pada pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
 - a) Penyusunan petunjuk teknis pengendalian pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
 - b) Penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengendalian pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
 - c) Pengendalian administrasi ketatausahaan;
 - d. Pengendalian pengelolaan perlengkapan;
 - d) Pengendalian pengelolaan kerumahtanggaan;

- e) Pengendalian administrasi barang;
- f) Pengendalian pengelolaan informasi publik;
- g) Pengendalian pengelola pengaduan dan survei kepuasan;
- h) Pengendalian administrasi kepegawaian;
- i) Pengendalian ketaatan jam kerja dan peningkatan kinerja pegawai;
- j) Pengendalian pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian; dan
- k) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Sekretaris Kecamatan terkait dengan tugas dan fungsinya.

III. SEKSI TATA PEMERINTAHAN

- 1) Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan tata pemerintahan ruang lingkup Kecamatan.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Tata Pemerintah menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan petunjuk teknis pengendalian tata pemerintahan;
 - b. Penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengendalian tata pemerintahan;
 - c. Pengendalian penataan administrasi pemerintahan kecamatan dan kelurahan;
 - d. Pengendalian administrasi kependudukan;
 - e. Pengendalian administrasi pertanahan dan PPAT;

- f. Pengendalian penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
- g. Pengendalian pemantauan dan evaluasi serta pelaporan penataan administrasi pemerintahan, kependudukan, pertanahan dan pelayanan administrasi terpadu kecamatan; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya.

IV. SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

- 1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan desa ruang lingkup kecamatan.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemberdayaan Masyarakat & Desa menyelenggarakan fungsi :
 - 1) Penyusunan petunjuk teknis pengendalian pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - 2) Penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengendalian pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - 3) Pengendalian fasilitasi pemberdayaan masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa/kelurahan;
 - 4) Pengendalian pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan;
 - 5) Pengendalian fasilitasi penataan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa;

- 6) Pengendalian fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa;
- 7) Pengendalian fasilitasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan;
- 8) Pengendalian fasilitasi pemanfaatan teknologi tepat guna;
- 9) Pengendalian fasilitasi peningkatan kapasitas aparatur desa;
- 10) Pengendalian pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
- 11) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya;

V. SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

- 1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban ruang lingkup kecamatan.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi ketentraman dan ketertiban menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan petunjuk teknis pengendalian ketentraman dan ketertiban;
 - b. Penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengendalian ketentraman dan ketertiban;
 - c. Pengendalian penyelenggaraan pelayanan administrasi koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;

- d. Pengendalian koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan;
- e. Pengendalian fasilitasi pembinaan satuan perlindungan masyarakat melalui kesiagaan dan penanggulangan bencana serta peningkatan sumber daya manusia satuan Linmas;
- f. Pengendalian pemantauan dan evaluasi pelaporan ketentraman dan ketertiban; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya.

VI. SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL, PENDIDIKAN DAN KESEHATAN

- 1) Seksi Kesejahteraan Sosial, Pendidikan dan Kesehatan mempunyai tugas pokok mengendalikan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kegiatan kesejahteraan sosial, pendidikan dan kesehatan ruang lingkup kecamatan.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kesejahteraan Sosial, Pendidikan dan Kesehatan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan petunjuk teknis pengendalian kesejahteraan sosial, pendidikan dan kesehatan;
 - b. Penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengendalian kesejahteraan sosial, pendidikan dan kesehatan;

- c. Pengendalian koordinasi dan fasilitasi pembinaan kerukunan umat beragama;
- d. Pengendalian koordinasi dan fasilitasi pendataan dan pengentasan kemiskinan;
- e. Pengendalian koordinasi dan fasilitasi kegiatan kepemudaan, olahraga dan kebudayaan;
- f. Pengendalian koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dasar 12 tahun dan perpustakaan;
- g. Pengendalian koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- h. Pengendalian pemantuan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan kesejahteraan sosial, pendidikan dan kesehatan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya.

VII. SEKSI PEREKONOMIAN, PEMBANGUNAN DAN PENDAPATAN

- 1) Seksi Perekonomian, Pembangunan dan pendapatan mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kegiatan perekonomian, pembangunan dan pendapatan.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perekonomian,

Pembangunan dan Pendapatan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan petunjuk teknis pengendalian perekonomian, pembangunan dan pendapatan;
- b. Penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengendalian perekonomian, pembangunan dan pendapatan;
- c. Pengendalian koordinasi dan fasilitasi pembinaan usaha ekonomi masyarakat;
- d. Pengendalian koordinasi dan fasilitasi kegiatan pembinaan perkoperasian, perindustrian dan perdagangan;
- e. Pengendalian koordinasi dan fasilitasi pengelolaan pasar;
- f. Pengendalian koordinasi dan fasilitasi kegiatan pembangunan sarana prasarana umum;
- g. Pengendalian koordinasi dan fasilitasi peningkatan pelayanan perhubungan, komunikasi dan informasi;
- h. Pengendalian koordinasi dan fasilitasi pengelolaan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup;
- i. Pengendalian koordinasi dan fasilitasi pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
- j. Pengendalian pemantauan dan evaluasi kegiatan perekonomian, pembangunan dan pendapatan; dan

- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya.

VIII. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

- 1) Kelompok jabatan fungsional berkedudukan sebagai unsur pembantu Camat dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya.
- 2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- 3) Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris kecamatan.
- 4) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 5) Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.
- 6) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, beban kerja dan kemampuan keuangan daerah. (7) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

1.4.3 Sumber Daya Kecamatan Tinambung

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Kantor Kecamatan Tinambung memiliki sumber daya organisasi berupa sumber daya manusia dan sarana serta prasarana. Adapun jumlah sumber daya manusia Kantor Kecamatan Tinambung adalah sebagai berikut :

1. Sumber daya Manusia

Dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Kecamatan Tinambung Di klasifikasikan menurut eselon, jenjang pendidikan, dan jenjang kepangkatan. Adapun bagan Kecamatan Tinambung ialah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Eselon

Tabel 1.2

Jumlah Aparatur Sipil Negara berdasarkan Eselon

No.	Jabatan	Eselon	Jumlah Pegawai
1.	Camat	III/a	1
2.	Sekretaris Camat	III/b	1
3.	Kepala Seksi/Lurah	IV/a	6
4.	Kepala Sub Bagian/ Sekretaris Lurah/Kepala Seksi Kelurahan	IV/b	6
5.	Fungsional Umum	-	21
Jumlah			35

Sumber Data : Kepegawaian Keadaan 31 Desember 2022

2. Berdasarkan Pangkat Golongan Ruang

Tabel 1.3.
Jumlah Aparatur Sipil Negara
berdasarkan Pangkat, Golongan / Ruang

NO	Pangkat	Gol. / Ruang	Jenis Kelamin		JMI	Ket
			Laki-laki	Perempuan		
1	Pembina Tk I	IV/b			0	
2	Pembina	IV/a	1		1	
3	Penata Tk.I	III/d	1	8	9	
4	Penata	III/c	1	2	3	
5	Penata Muda Tk.I	III/b	4	3	7	
6	Penata Muda	III/a	4	3	7	
7	Pengatur Tk.I	II/d	1	2	3	
8	Pengatur	II/c	2	1	3	
9	Pengatur Muda Tk.I	II/b	1	1	2	
10	Pengatur Muda	II/a			0	
Jumlah			15	20	35	

Sumber Data : Kepegawaian Keadaan 31 Desember 2022

3. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 1.4.
Jumlah Aparatur berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jml	Ket
		Laki-laki	Perempuan		
1	PASCASARJANA (S-2)	1	1	2	
2	SARJANA (S-1)	6	16	22	
3	D.IV	-	-	-	
4	D.III	-	-	-	
5	D.I	-	-	-	
6	SLTA	6	5	11	
7	SLTP	-	-	-	
8	SD	-	-	-	
Jumlah		13	22	35	

Sumber Data : Kepegawaian Keadaan 31 Desember 2022

4. Berdasarkan Diklat Penjenjangan

Tabel 1.5.

Jumlah Aparatur berdasarkan Diklat Perjenjang

No.	Diklat Perjenjang	Jumlah Pegawai
1	PIM II/SPAMEN	- Orang
2	PIM III/ SPAMA	- Orang
3	PIM IV/ADUM/ADUMLA	1 Orang

Sumber Data : Kepegawaian Keadaan 31 Desember 2022

5. Sarana dan Prasarana

Secara keseluruhan jumlah perlengkapan kantor yang dikelola oleh Kecamatan Tinambung dalam mendukung tugas pokok dan fungsi organisasi mencakup beberapa barang sebagaimana ditunjukkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.6.

Sarana dan Prasarana yang dimiliki Kecamatan Tinambung

No	Nama Barang	Kondisi		Keterangan
		Baik	Rusak	
1	Bangunan Gedung	3	-	3 Lokasi
2	Instalasi Gardu Listrik	1	-	Listrik Kantor
3	Sumur Resapan	2	-	2 Lokasi
4	Kendaraan Dinas Roda 4 (Pickup)	1	-	Mobil Murah
5	Meja Rapat	2	-	
6	Laptop	5	-	
7	Kendaraan Dinas Roda 3	1	-	Mutasi dari DLHK
8	Kursi Plastik	100	-	
9	Mesin Pemotong Rumput	3	-	
10	LoudSpeaker	1	-	
11	Sound System	1	-	
12	Personal Computer	6	-	
13	Pompa Air	2	-	
14	Lemari Kaca	1	-	
15	Tandon Air	1	-	
16	Lemari Besi	4	-	
17	Air Conditioner	12	-	
18	Printer	3	-	

19	Kendaraan Dinas Roda 6	2	-	BUS Sekolah
20	Kendaraan Dinas Roda 6	1	-	Mobil Pemadam
21	Kendaraan Dinas Roda 4	1	-	Mobil Camat
22	Kendaraan Dinas Roda 2	1	3	
23	Lemari Kayu	3	-	
24	Rak Besi	1	-	
25	Rak Kayu	1	-	
26	Lemari Kaca	1	-	
27	White Board	1	-	
28	Meja Kerja Kayu	8	-	
29	Kursi Kayu	14	-	
30	Tempat Tidur Kayu	2	-	
31	Meja Telepon	-	1	
32	Meja ½ Biro	11	-	
33	Meja Makan Besi	-	1	
34	Kursi Rapat	100	50	
35	Kursi Tamu	2	-	
36	Kursi Putar	7	1	
37	Kursi Biasa	2	7	
38	Meja Komputer	2	-	
39	Sofa	1	-	
40	Lemari Es	1	-	
41	Kompor Gas	1	-	
42	Tabung Gas	1	-	
43	Televisi	1	-	
44	Amplifier	1	-	
45	Dispenser	1	-	
46	Meja Tamu	1	-	
47	Kursi Kerja Non Struktural	16	-	
48	Buffet Kaca	1	-	
49	Mixer	1	-	
50	Meja Kerja	2	-	
51	Keyboard	-	1	

Sumber Data : Kepegawaian Keadaan 31 Desember 2022

1.5. ISU SRATEGIS

Isu-isu Strategis organisasi pada kantor Kecamatan Tinambung adalah Permasalahan pembangunan daerah merupakan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi rill saat perencanaan dibuat.

Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum difungsikan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan serta ancaman yang tidak diantisipasi, sebagai berikut :

1.5.1 Faktor Ancaman (*Threat*)

1. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang seringkali saling bertentangan. Dan hal tersebut harus ditampung dan diperhatikan;
2. Masih adanya aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan partisipatif;
3. Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat di Kecamatan Tinambung;
4. Masih adanya kebijakan yang kadang–kadang tidak berpihak pada masyarakat.
5. PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan). Kecamatan sebagai salah satu OPD di Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan

tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku.

1.5.2 Terdapat permasalahan/kendala atau isu-isu yang harus mendapatkan penanganan. Isu tersebut antara lain :

1. Sumber daya manusia yang kurang dari segi kuantitas.
2. Belum terisinya beberapa jabatan fungsional umum di tingkat Kecamatan dan Kelurahan.
3. Pegawai belum semuanya mendapatkan diklat teknis dan fungsional maupaun Diklat PIM sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
4. Mengendurnya semangat masyarakat akibat dari menurunnya kepercayaan terhadap jaminan kepastian akan direalisasikannya rencana pembangunan hasil Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan.
5. Inkonsistensi terhadap pelaksanaan dokumen perencanaan sebagai akibat kurangnya komitmen untuk melaksanakannya.
6. Masih lemahnya koordinasi antar SKPD dalam perencanaan dan monitoring evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
7. Koordinasi dan konsultasi antara pemerintah desa, pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten masih

belum berjalan sesuai dengan seharusnya sehingga masih sering terjadi ketidakpastian kewenangan.

8. Kurangnya pemanfaatan sumberdaya perencanaan, baik *hardware*, *software* maupun *brainware*.
9. Kesadaran masyarakat untuk melaksanakan aktifitas sosial yang menunjang peningkatan kualitas hidup warga miskin dan difabel masih kurang.
10. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya penanggulangan bencana di daerah rawan bencana.

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai salah satu perangkat daerah yang langsung berhubungan dengan masyarakat, Kecamatan Tinambung merupakan perpanjangan tangan dari Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar. Sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasaranan, serta kelembagaan menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat

1.6. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Substansi yang tercakup dalam Laporan Kinerja Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

IKHTISAR EKSEKUTIF

Menguraikan tentang penerapan sistem akuntabilitas kinerja dan pencapaian kinerja sasaran Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar selama Tahun 2022.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang, landasan hukum, tugas dan fungsi, permasalahan utama serta sistematika penyajian Laporan Kinerja Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Dalam bab ini diikhtisarkan beberapa hal penting dalam perencanaan kinerja yang meliputi perencanaan strategis dan penetapan kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam bab ini menggambarkan akuntabilitas kinerja yang terdiri atas capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran yang mendukung terwujudnya pencapaian kinerja

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini diuraikan keberhasilan dan kegagalan, kendala dan hambatan dalam pencapaian kinerja serta langkah antisipatif dan strategi pemecahan masalah.

LAMPIRAN

Dalam lampiran menampilkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar. Perjanjian kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan umum disusunnya Perjanjian Kinerja yaitu dalam rangka Intensifikasi pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Peningkatan kualitas pelayanan publik, Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Namun demikian, ruang lingkup ini lebih diutamakan terhadap berbagai program utama organisasi, yaitu program-program yang dapat menggambarkan keberadaan organisasi serta menggambarkan isu strategis yang sedang dihadapi organisasi.

Untuk itu, penyusunan Perencanaan Kinerja Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 merupakan sasaran dan target kinerja yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019 – 2024, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022, Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022, serta dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022. Target Kinerja tersebut merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2022. Target Kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolak ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi didalam upaya pencapaian visi misi RPJMD Kabupaten Polewali Mandar dan akan menjadi komitmen bagi Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar untuk mencapainya dalam Tahun 2022.

2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu Rencana Strategis yang setidaknya memuat Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan. Penyusunan Renstra Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024 merupakan amanat dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Renstra Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar disusun dari hasil penyelarasan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024 dan telah disesuaikan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar. Berdasarkan Renstra Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024, telah ditetapkan 2 (dua) sasaran strategis dan 4 (empat) indikator kinerja yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1
Sasaran Strategis, Indikator Sasaran dan Target
Kecamatan Tinambung 2019 - 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL 2019	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Kecamatan	Indeks Kepuasan Layanan Pemerintahan Kecamatan	B	B	B	B	B	BB
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	B	B	B	B	B	BB
		Persentase Tertib Pengolahan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah	100% (WTP)	100% (WTP)	100% (WTP)	100% (WTP)	100% (WTP)	100% (WTP)
		Indeks Kepuasan Pengguna Pelayanan Publik Perangkat Daerah	B	B	B	B	B	BB

2.2 Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun yang

bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang telah diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Adapun Perjanjian Kinerja Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Sasaran Strategis, Indikator Sasaran dan Target
Tahun 2022 Kecamatan Tinambung

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2021	TARGET 2022
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Kecamatan	Indeks Kepuasan Layanan Pemerintahan Kecamatan	BAIK	SANGAT BAIK
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Predikat SAKIP	B	B
		Persentase Tertib Pengolahan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah	100% (WTP)	100% (WTP)
		Indeks Kepuasan Pengguna Pelayanan Publik Perangkat Daerah	BAIK	SANGAT BAIK

Tabel 2.3
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Alokasi Anggaran
Kecamatan Tinambung 2022

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	
				TAHUN 2021	TAHUN 2022
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 10.000.000	Rp 4.310.500
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp 2.999.800	Rp 11.534.300
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 1.499.800	Rp 3.184.300
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 1.997.600	Rp 2.086.400
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 2.640.456.474	Rp 2.625.933.644
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 1.063.400	Rp 4.605.000
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Rp 430.000	Tidak dianggarkan
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Rp 1.950.000	Tidak dianggarkan
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp 10.300.000	Tidak dianggarkan
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 2.800.850
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Rp 13.367.400	Rp 17.485.500
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Rp 31.630.000	Rp 42.960.000
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Rp 2.988.000	Rp 9.533.700
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Rp 1.320.000	Rp 1.320.000
		Penyediaan Bahan/Material		Rp 13.996.200	Rp 20.396.528
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 82.036.100	Rp 116.773.900	

		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 13.486.600	Rp 8.004.500
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 34.936.080	Rp 23.631.024
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 14.395.000	Rp 18.761.400
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 244.429.450	Rp 325.181.600
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 9.300.000	Rp 12.000.000
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Kecamatan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Rp 237.579.824	Rp 19.317.750
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp 64.194.900	Rp 177.860.600
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp 2.040.000	Aggarannya disatukan ke sub kegiatan koordinasi/sinergi perencanaan
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Rp 2.095.500	Rp 14.118.600
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Rp 101.790.000	Rp 114.000.000
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan nya baru ada di 2022 jadi dana nya di 2021 ada di sub kegiatan koordinasi/sinergi	Rp 169.760.771
	Jumlah			Rp 3.543.082.978	Rp 3.746.985.017

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah salah satu media pertanggungjawaban instansi pemerintah yang pada dasarnya merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan atau kegagalan dalam pelaksanaan Visi dan Misi organisasi dalam mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan.

Sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan atau kegagalan tersebut perlu dilakukan evaluasi kinerja dengan menganalisis Akuntabilitas Kinerja berupa pengukuran capaian kinerja dengan menetapkan Indikator Kinerja dan Metodologi Pengukurannya, dan Analisis Akuntabilitas Keuangan.

3.1.1 Indikator Kinerja Kecamatan Tinambung

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja merupakan suatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja. Indikator Kinerja menjadi patokan penilaian keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai visi dan misi organisasi. Adapun beberapa jenis indikator kinerja yang sering digunakan dalam pelaksanaan pengukuran suatu organisasi:

1. Indikator Masukan (Input) adalah menunjukkan segala sesuatu yang diperlukan dalam rangka menghasilkan

Keluaran (output) misalnya sumber daya manusia, dana, waktu, material, teknologi dan lain-lain.

2. Indikator Proses adalah segala besaran yang menunjukkan upaya yang harus dilakukan dalam rangka mengolah masukan menjadi keluaran, indikator proses menggambarkan perkembangan atau aktifitas yang terjadi atau dilakukan selama pelaksanaan kegiatan berlangsung, khususnya dalam proses mengolah masukan menjadi keluaran.
3. Indikator Keluaran (Output) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan non fisik.
4. Indikator Hasil (Outcome) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada tingkat pencapaian kinerja yang diharapkan terwujud.
5. Indikator Manfaat (Benefit) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.
6. Indikator Dampak (Impact) adalah indikator yang menggambarkan pengaruh dari pencapaian program terhadap masyarakat secara luas.

Indikator ini diukur setelah berlalunya kegiatan atau program dalam jangka waktu tertentu. Oleh karena belum terbentuknya sistem pengukuran kinerja yang baik dalam organisasi, maka Pengukuran Kinerja ini baru bisa dilaksanakan pada tingkat Indikator Keluaran (Output)/Indikator Hasil (Outcome).

3.1.2 Metodologi Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja meliputi proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan

kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi, dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Pencapaian setiap indikator kinerja dilakukan dengan metodologi perbandingan Capaian Kinerja (Performance Result) dengan Rencana Kinerja (Performance Plan) tahun 2022 sebagai tolok ukur keberhasilan organisasi. Pencapaian setiap indikator tersebut pada tingkat pencapaian target dari kelompok indikator kinerja kegiatan dan sasaran yang telah dituangkan dalam rencana kinerja, berdasarkan sasaran dan program dalam Rencana Strategis. Angka persentase capaian indikator kinerja didapatkan dengan menghitung persentase perbandingan realisasi capaian dengan rencana pada tingkat kegiatan dan selanjutnya pada tingkat sasaran.

3.2 Capaian Indikator Kinerja Sasaran

Evaluasi kinerja berupa Analisis Pencapaian Sasaran Strategis dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi atas sebanyak 2 (empat) Indikator Kinerja dengan 4 (empat) Sasaran Strategis, dan menentukan persentase hasil pencapaiannya.

Persentase hasil capaian dikelompokkan dalam 4 (empat) klasifikasi penilaian yaitu :

1. Pencapaian indikator kinerja sasaran 88% sampai dengan di bawah 100% predikatnya “Sangat Baik.”
2. Pencapaian indikator kinerja sasaran 76% sampai dengan di bawah 88% predikatnya “Baik.”

3. Pencapaian indikator kinerja sasaran 65% sampai dengan di bawah 76% predikatnya “Kurang Baik”
4. Pencapaian indikator kinerja sasaran 25% sampai dengan di bawah 65% predikatnya “Tidak Baik”

Tabel 3.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (x)	KINERJA UNIT PELAYANAN (y)
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik

Berdasarkan PERMENPAN No 14 Tahun 2017

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	CAPAIAN	KRITERIA/KODE
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Kecamatan	Indeks Kepuasan Layanan Pemerintahan Kecamatan	SANGAT BAIK (100)	SANGAT BAIK (90)	SANGAT BAIK
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	BAIK (70)	BAIK (70)	BAIK
		Persentase Tertib Pengolahan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah	100 % (WTP)	100 % (WTP)	SANGAT BAIK
		Indeks Kepuasan Pengguna Pelayanan Publik Perangkat Daerah	SANGAT BAIK (100)	SANGAT BAIK (90)	SANGAT BAIK

Dari hasil evaluasi sebagaimana terlihat pada Tabel 3.2 di atas, dari 2 sasaran strategis yang terbagi ke dalam 4 indikator kinerja strategis sebanyak 3 indikator kinerja telah memenuhi target yang ditetapkan “**Sangat Baik**” dan satu indicator kinerja dengan predikat “**Baik**” dari total indikator, indikator Indeks Kepuasan Pengguna Pelayanan Publik Perangkat Daerah dengan capaian kinerja sasaran sebesar 90 dengan kreteria Sangat baik dimana hal tersebut di dapat dilihat dengan hasil survey dari masyarakat yang rata-rata memberikan hasil puas dengan pelayanan Kantor Camat Tinambung

Capaian kinerja Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 dilaporkan untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar selama Tahun 2022. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kerjanya dengan rincian sebagai berikut:

3.3 Capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Layanan Pemerintahan Kecamatan

Sasaran Strategis : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Kecamatan

Indikator : Indeks Kepuasan Layanan Pemerintahan Kecamatan
Target : Sangat Baik



Pada aspek sasaran strategis ini, diharapkan Kecamatan Tinambung dapat meningkatkan kapabilitas pemerintahan dan pelayanan kecamatan sehingga dapat mencapai predikat Baik (B). Kecamatan Tinambung diharapkan mampu berkordinasi dan bersinergi dengan Instansi Vertikal Terkait dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Demikian pula halnya dengan

pengukuran kinerja, dilakukan secara berjenjang berdasarkan sasaran, indikator sasaran, dan target yang diperjanjikan.

3.3.1 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Layanan Pemerintahan Kecamatan

Indeks Kepuasan Layanan Pemerintahan Kecamatan didefinisikan sebagai pewujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Tabel 3.3.
Perbandingan Target dan Capaian

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Kecamatan	Indeks Kepuasan Layanan Pemerintah Kecamatan	Sangat Baik	Sangat Baik

3.3.2 Perbandingan Capaian Tahun Ini dan Tahun lalu Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Layanan Pemerintahan Kecamatan

Pengukuran sasaran strategis “Meningkatnya Kapabilitas Pemerintahan dan pelayanan Kecamatan” melalui Indikator “Indeks Kepuasan Layanan Pemerintah Kecamatan” dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.4. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2020		2021		2022		Kenaikan / Penurunan Realisasi dari tahun sebelumnya
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Kecamatan	Indeks Kepuasan Layanan Pemerintah Kecamatan	Baik (88,30)	Baik (81,25)	Baik (88,30)	Baik (92,17)	Sangat Baik (100)	Sangat Baik (90)	Tetap

Berdasarkan Tabel tersebut di atas diilustrasikan bahwa pencapaian kinerja pada indikator Indeks Kepuasan Layanan Pemerintah Kecamatan tidak mengalami Kenaikan maupun Penurunan dimana status Baik masih tetap dipertahankan yang menjadi target pada RPJMD tahun 2022 .

3.3.3 Perbandingan Capaian Tahun Ini dan Tahun Akhir Renstra Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Layanan Pemerintahan Kecamatan

Tabel 3.5. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Restra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Restra	Capaian Tahun 2022
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Kecamatan	Indeks Kepuasan Layanan Pemerintah Kecamatan	Sangat Baik (100)	Sangat Baik (90)

Berdasarkan Tabel diatas di jelaskan bahwa indikator kinerja Indek Kepuasan Layanan Pemerintah Kecamatan masih berada pada predikat “B” yang mana masih belum mampu mencapai target yang telah ditetapkan target akhir Renstra yakni predikat “BB”

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

<p>Faktor Penunjang :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Tingginya motivasi kerja pegawai kelurahan dan desa b. Meningkatnya minat masyarakat untuk mengikuti kegiatan yang diselenggarakan atau dinaungi oleh kecamatan 	<p>Faktor Penghambat :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Terbatasnya kelengkapan sarana prasarana di kantor kelurahan dan desa b. Masih kurangnya anggaran untuk kegiatan masyarakat
<p>Solusi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengadaan sarana dan prasarana untuk kantor kelurahan dan desa b. Optimalisasi pemeliharaan dan penyediaan sarana prasarana kerja yang ada 	

Adapun Program dan Kegiatan untuk pencapaian sasaran ini, sebagai berikut :

Tabel 3.6. Program Dan Kegiatan Untuk Indeks Kepuasan Layanan Pemerintahan Kecamatan

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		2021			2022		
			Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran		Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	
				Jumlah (Rp)	%		Jumlah (Rp)	%
1	2					4	5	6
	Jumlah Anggaran		407.700.224,00	407.593.997,00	99,97	495.057.721,00	495.057.721,00	100,00
1	Program	Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik				325.298.950,00	325.298.950,00	100,00
1	Kegiatan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	301.774.724,00	301.668.497,00	99,96	197.178.350,00	197.178.350,00	100,00
1	Sub Kegiatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi vertikal terkait	237.579.824	237.473.597	99,96	19.317.750	19.317.750	100,00
2		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	64.194.900	64.194.900	100,00	177.860.600	177.860.600	100,00
2	Kegiatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	2.040.000,00	2.040.000,00	100,00			
1	Sub Kegiatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2.040.000	2.040.000	100,00			
3	Kegiatan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	103.885.500,00	103.885.500,00	100,00	128.118.600,00	128.118.600,00	100,00
1	Sub Kegiatan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	2.095.500	2.095.500	100,00	14.118.600	14.118.600	100,00
2		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	101.790.000	101.790.000	100,00	114.000.000	114.000.000	100,00
2	Program	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan						
1	Kegiatan	Pemberdayaan Kelurahan				169.760.771,00	169.760.771,00	100,00
1	Sub Kegiatan	Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kelurahan				169.760.771	169.760.771	100,00

Tabel 3.7. Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 Untuk Indeks Kepuasan Layanan Pemerintah Kecamatan

Sasaran	Kinerja			Anggaran			Keterangan
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Kecamatan	Sangat Baik (100)	Sangat Baik (90)	90 %	Rp. 495.057.721	Rp. 495.057.721	100 %	3 Kegiatan, 5 Sub Kegiatan

3.3.4 Analisis Efisiensi Indeks Kepuasan Layanan Pemerintah Kecamatan

Tabel 3.8. Capaian Kinerja 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	% Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Kecamatan	Indeks Kepuasan Layanan Pemerintah Kecamatan	90 %	100 %	10 %

3.4 Capaian Indikator Kinerja Predikat SAKIP Perangkat Daerah

Sasaran Strategis :

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Indikator : Predikat SAKIP Perangkat Daerah

Target : Baik



SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Akuntabilitas merupakan kewajiban dari individu-individu penguasa

yang dipercaya mengelola sumber-sumber daya publik untuk mempertanggungjawabkan berbagai hal menyangkut fiskal, manajerial dan program. Sesuai Inpres No 7 tahun 1999 Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungwaban secara periodik. Untuk mengukur kinerja indikator Predikat SAKIP Perangkat Daerah Kantor Camat Tinambung tahun 2022, menggunakan tabel performa kinerja berikut ini :

Tabel 3.9. Performa Kinerja

Interval Hasil Kerja	Performa	Simbol
90-100	Optimal	AA
80-90	Sangat Baik	A
70-80	Baik Sekali	BB
60-70	Baik	B
50-60	Kurang Baik	CC
30-50	Kurang	C
0-30	Sangat Buruk	D

Ket : Setelah didapat Nilai Capaian Kinerja Akhir suatu organisasi maka kinerja dimasukkan ke dalam skala interval hasil kinerja sebagai tersebut di Formula tersebut di atas.

3.4.1 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Predikat SAKIP Perangkat Daerah

Akuntabilitas kinerja didefinisikan sebagai pewujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Tabel 3.10. Perbandingan Target dan Capaian

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2022	
		Target	Capaian
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	B	B

3.4.2 Perbandingan Capaian Tahun Ini dan Tahun lalu Indikator

Kinerja Predikat SAKIP Perangkat Daerah

Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah merupakan satu kesatuan dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar. Di tingkat Perangkat Daerah, juga diimplementasikan Perencanaan Kinerja berupa penyusunan Renstra, Renja, RKA, DPA, Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi. Demikian pula halnya dengan pengukuran kinerja, dilakukan secara berjenjang berdasarkan sasaran, indikator sasaran, dan target yang diperjanjikan. Selanjutnya pada akhir tahun dilakukan penyusunan Laporan Kinerja berupa LAKIP dan diakhiri dengan review oleh Inspektorat.

Tabel 3.11. Perkembangan SAKIP Kecamatan Tinambung

No	Komponen Sakip	2020		2021	
		Bobot	Nilai	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30	16,5	30	22,25
2.	Pengukuran Kinerja	25	3,44	25	17,19
3.	Pelaporan Kinerja	15	3,69	15	9,80
4.	Evaluasi Internal	10	0,83	10	4,50
5.	Capaian Kinerja	20	4,25	20	7,25
	Nilai Hasil Evaluasi	100	28,71	100	60,99
	Nilai Hasil Evaluasi		D		B

Predikat SAKIP Perangkat Daerah Kecamatan Tinambung tahun 2021 adalah akumulasi hasil yang dicapai berdasarkan Surat dari Inpektorat Kabupaten Polewali Mandar Nomor : 002.z/LHE/itkab/700/6/2022 tentang Laporan Hasil Evaluasi SAKIP SKPD Tahun 2021 memperoleh Penilaian AKIP sebesar 60,98 point dengan performa kinerja “ B” (Baik) dan untuk penilaian AKIP tahun 2022 belum dilakukan namun diharapkan tetap dapat memperoleh performa kinerja “B” atau bahkan bisa lebih.

Tabel 3.12. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2020		2021		2022		Kenaikan / Penurunan Realisasi dari tahun sebelumnya
		Target	Capaian	Capaian	Capaian	Target	Capaian	Kenaikan
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Predikat SAKIP Perangkat Daerah.	B (70)	D (28,71)	B (70)	B (60,8)	B (70)	B (70)	Kenaikan 9,2 POINT

Berdasarkan Tabel tersebut di atas diilustrasikan bahwa pencapaian kinerja pada indicator Predikat SAKIP Perangkat Daerah sasaran strategis Meningkatkan Akuntabilitas Satuan Kerja mengalami Kenaikan 9,2 point

3.4.3 Perbandingan Capaian Tahun Ini dan Tahun Akhir Renstra

Indikator Kinerja Predikat SAKIP Perangkat Daerah

Realisasi Predikat SAKIP Perangkat Daerah pada tahun 2022 adalah 70 point dengan performa Baik (B) nilai tersebut telah masih belum mencapai target renstra (BB) yang telah ditetapkan pada Renstra. Untuk memudahkan kami sajikan perbandingan

capaian Kinerja Tahun 2022 dengan target Renstra pada Indikator Predikat SAKIP Perangkat Daerah sebagai berikut :

Tabel 3.13. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Restra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Restra	Capaian Tahun 2022
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja	Pedikat SAKIP Perangkat Daerah	BB (80)	B (70)

Berdasarkan Tabel diatas di jelaskan bahwa Tingkat Kemajuan dengan performa “B” (Baik) menandakan bahwa target RENSTRA belum tercapai berdasarkan poin yang dihasilkan sedangkan berdasarkan performa kinerja tidak dimana Target Restra “BB”.

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

<p>Faktor Penunjang :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Optimalnya pendampingan dan penguatan SAKIP oleh Bagian Organisasi, Bappeda, dan Inspektorat b. Tersedianya aplikasi e-SAKIP 	<p>Faktor Penghambat :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Belum optimalnya pengelolaan data kinerja b. Belum tertibnya pelaksanaan pengukuran kinerja
<p>Solusi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan rapat-rapat internal untuk monitoring dan evaluasi kinerja b. Penyusunan standar kelengkapan data-data kinerja organisasi 	

Adapun Program dan Kegiatan untuk pencapaian sasaran ini, sebagai berikut :

Tabel 3.14. Program Dan Kegiatan Untuk Predikat SAKIP

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		2021			2022		
			Anggaran	Realisasi		Anggaran	Realisasi	
				Jumlah (Rp)	%		Jumlah (Rp)	%
1	2		3	4	5	6	7	8
Jumlah Anggaran			16.497.200,00	16.497.200,00	100,00	21.115.500,00	21.115.500,00	100,00
1	Program	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
1	Kegiatan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.497.200,00	16.497.200,00	100,00	21.115.500,00	21.115.500,00	100,00
1	Sub Kegiatan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000	10.000.000	100,00	4.310.500	4.310.500	100,00
2		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.999.800	2.999.800	100,00	11.534.300	11.534.300	100,00
3		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.499.800	1.499.800	100,00	3.184.300	3.184.300	100,00

Tabel 3.15. Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 Untuk Predikat SAKIP

Sasaran	Kinerja			Anggaran			Keterangan
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	(B) 70	(B) 70	100 %	Rp. 21.115.500	Rp. 21.115.500	100 %	1 Kegiatan, 3 Sub Kegiatan

3.4.4 Analisis Efisiensi Predikat SAKIP

Tabel 3.16. Capaian Kinerja 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	% Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Pedikat SAKIP Perangkat Daerah	100 %	100 %	0 %

3.5 Capaian Indikator Kinerja Persentase Tertib Pengolahan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah

Sasaran Strategis :

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Indikator : Persentase Tertib Pengolahan
Keuangan dan Aset Perangkat Daerah

Target : 100 % (WTP)



Pada aspek sasaran strategis ini, diharapkan Kecamatan Tinambung turut menjadi bagian pencapaian Opini Pengelolaan Keuangan BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Memperhatikan capaian Opini BPK dimaksud dalam 2 tahun terakhir yang selalu mencapai WTP, maka diharapkan pencapaian WTP untuk tahun anggaran 2022 ini dapat kembali mencapai WTP. Hasil opini BPK terhadap Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar masih dalam proses pemeriksaan BPK, namun dalam hal ini Kecamatan Tinambung optimis turut menjadi Perangkat Daerah yang berperan aktif dalam pencapaian Opini WTP.

3.5.1 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Tertib Pengolahan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah

Opini Pengelola Keuangan didefinisikan sebagai pewujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Tabel 3.17. Perbandingan Target dan Realisasi

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Persentase Tertib Pengolahan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah	100% (WTP)	100% (WTP)

Opini Pengelola Keuangan Kecamatan Tinambung adalah Hasil opini BPK terhadap Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar masih dalam proses pemeriksaan BPK, namun dalam hal ini Kecamatan Tinambung optimis turut menjadi Perangkat Daerah yang berperan aktif dalam pencapaian Opini WTP.

3.5.2 Perbandingan Capaian Tahun Ini dan Tahun lalu Indikator Kinerja Persentase Tertib Pengolahan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah

Pengukuran sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah” melalui Indikator “Persentase Tertib Pengolahan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah” dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.18. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2020		2021		2022		Kenaikan / Penurunan Realisasi dari tahun sebelumnya
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Persentase Tertib Pengolahan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah	100 % (WTP)	100 % (WTP)	100 % (WTP)	100 % (WTP)	100 % (WTP)	100 % (WTP)	Tetap

Berdasarkan Tabel tersebut di atas diilustrasikan bahwa pencapaian kinerja pada indikator Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah tidak mengalami Kenaikan maupun Penurunan dimana status WTP masih tetap dipertahankan yang menjadi target pada RPJMD tahun 2022 .

3.5.3 Perbandingan Capaian Tahun Ini dan Tahun Akhir Renstra Indikator Kinerja Persentase Tertib Pengolahan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah

Realisasi Opini Pengelolaan Keuangan pada tahun 2022 adalah WTP nilai tersebut telah mencapai target renstra WTP yang telah ditetapkan tingkat capaian WTP pada tahun 2022. Sebagai alat kami sajikan perbandingan capaian Kinerja Tahun 2022 dengan target Renstra pada Indikator Opini Pengelolaan Keuangan sebagai berikut :

Tabel 3.19. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2022
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Persentase Tertib Pengolahan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah	(100%) WTP	(100%) WTP

Berdasarkan Tabel diatas di jelaskan bahwa predikat WTP masih melekat serta masi mampu mencapai target yang telah ditetapkan target akhir renstra.

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

<p>Faktor Penunjang :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Tingginya komitmen seluruh jajaran pegawai Kecamatan Tinambung untuk mencapai WTP atau tidak adanya temuankerugian negara dan penyimpangan administrasi dan sistem prosedur b. Tersedianya aplikasi SIM Keuangan Daerah yang memudahkan tertib pengelolaan keuangan daerah 	<p>Faktor Penghambat :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Belum optimalnya pemahaman akuntansiberbasis akrual SDM Pengelola Keuangan b. Belum optimalnya tertib administrasi aset
<p>Solusi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Mengoptimalkan koordinasi dan konsultasi dengan Badan Keuangan dalam rangka penguatan akuntansi dan aset b. Peningkatan tertib administrasi keuangan dan tertib pengarsipan 	

Adapun Program dan Kegiatan untuk pencapaian sasaran ini, sebagai berikut :

Tabel 3.20. Program Dan Kegiatan Untuk Persentase Tertib Pengolahan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		2021			2022		
			Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran		Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	
				Jumlah (Rp)	%		Jumlah (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Jumlah Anggaran		2.643.899.874,00	2.595.449.110,00	98,17	2.630.538.644,00	2.605.038.271,00	99,03
1	Program	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
1	Kegiatan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.643.899.874,00	2.595.449.110,00	98,17	2.630.538.644,00	2.605.038.271,00	99,03
1	Sub Kegiatan	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	2.640.456.474	2.592.005.710	98,17	2.625.933.644	2.600.433.271	99,03
2		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1.950.000	1.950.000	100,00	-	-	-
3		Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	1.063.400	1.063.400	100,00	4.605.000	4.605.000	100,00

Tabel 3.21. Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 Untuk Persentase Tertib Pengolahan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah

Sasaran	Kinerja			Anggaran			Keterangan
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	100% (WTP)	100% (WTP)	100 %	Rp. 2.630.538.644	Rp. 2.605.038.271	90,3 %	1 Kegiatan, 2 Sub Kegiatan

3.5.4 Analisis Efisiensi Persentase Tertib Pengolahan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah

Tabel 3.22. Capaian Kinerja 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	% Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Persentase Tertib Pengolahan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah	100 %	90,3 %	0,97 %

3.6 Capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Pengguna Pelayanan Publik Perangkat Daerah

Sasaran Strategis :

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Indikator : Indeks Kepuasan Pengguna Pelayanan Publik Perangkat Daerah

Target : Sangat Baik



Dalam upaya memastikan tercapainya sasaran strategis Kecamatan Tinambung, kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh Kecamatan Tinambung adalah hal yang paling utama. Terdapat 13 (tiga belas) layanan yang telah dilakukan survey kepuasan pelayanan, yaitu : Layanan Penertiban Dispensasi

Nikah, Layanan Izin IMB (ukuran dibawah 50 m2), Layanan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK), Layanan Izin OSS (Formulir Onlinen Single Submission) Modal Usaha dibawah 50 Juta), Layanan Surat Rekomendasi Dan Surat Lainnya, Layanan Administrasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), Layanan Izin Pelataran, Layanan Administrasi Surat Keterangan Domisili, Layanan Administrasi Surat Keterangan Pindah Penduduk, Layanan Administrasi Surat Keterangan Waris, Layanan Administrasi Surat Keterangan Telah Atau Belum melakukan pemotretan E-KTP, Layanan Administrasi Surat Keterangan Hak Milik Tukang Kapal, Layanan Administrasi Surat Keterangan Pengoperan Hak Tanah

Indeks Kepuasan Layanan Pemerintah Kecamatan adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan harapan dengan kebutuhannya. IKM merupakan indeks hasil dari survei Kepuasan Masyarakat yang telah dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Pada peraturan tersebut diatur secara teknis cara melakukan survei yang baik dan benar dengan ukuran sampling yang proporsional sesuai dengan jumlah perkiraan populasi kunjungan masyarakat yang akan dilayani petugas Pelayanan Publik suatu institusi. Dan untuk mengukur keberhasilan pelayanan publik Kecamatan Tinambung maka dilakukan survey kepuasan publik atas layanan yang dilaksanakan di Kantor Camat Tinambung dengan hasil survey atau SKM unit Layanan X 25 dan hasil akhir

dimasukkan di skala interval hasil sebagaimana format Penilaian SKM di bawah ini :

Tabel 3.23. Penilaian SKM

NP	NI	NIK	MP	KUP
1	1.00 - 2.5996	25.00 - 64.99	D	Tidak Baik
2	2.60 - 3.064	65.00 - 76.60	C	Kurang Baik
3	3.0644 - 3.532	76.61 - 88.30	B	Baik
4	3.5324 - 4.00	88.31 - 100	A	Sangat Baik

Ket :

NP = Nilai Persepsi

NI = Nilai Interval

NIK = Nilai Internal Konversi

MP = Mutu Pelayanan

KUP = Kinerja Unit Pelayanan.

SKM Unit Pelayanan X 25

Interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25 –100, maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai 25.

Tingkat capaian kinerja pada indikator indeks kepuasan layanan publik Kecamatan Tinambung Kabupaten Tinambung Mandar tahun 2022 berdasarkan hasil pengukuran di atas diilustrasikan pada penjelasan capaian sasaran strategis hasil pengukuran keberhasilan pelayanan publik Kecamatan Tinambung melalui survey kepuasan publik atas layanan yang dilaksanakan di Kantor Camat Tinambung, adapun survey yang dilaksanakan adalah pengumpulan data hasil isian responden pada kuesioner yang dibagikan ke Masyarakat pada unit layanan Kantor Camat Tinambung. Survei dilakukan dua dalam periode dalam jangka waktu satu tahun, yaitu Periode Januari – Juni dan Periode Juli – Desember tahun 2022. Dalam penentuan responden, terlebih dahulu ditentukan jumlah populasi penerima layanan (jumlah

pemohon) dari seluruh jenis pelayanan pada Kantor Kecamatan Tinambung. Responden dipilih secara acak dari setiap jenis pelayanan.

Jumlah populasi pengguna layanan pada Kantor Camat Tinambung Periode bulan Januari – Desember 2022 adalah 575 orang, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.24. Tabel Responden di E-Survey 2022 Kecamatan Tinambung

NO	KARAKTERISTIK	INDIKATOR	Jumlah (Orang)
1	2	3	4
1	Jenis Kelamin	Laki-laki	360
		Perempuan	215
Total			575
2	Pendidikan	SD	59
		SMP	65
		SMA	290
		S1	151
		S2	10
		S3	
Total			575
3	Jenis Layanan	Layanan Penertiban Dispensasi Nikah	23
		Layanan Izin IMB (ukuran dibawah 50 m2)	4
		Layanan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)	10
		Layanan Izin OSS (Formulir Onlinen Single Submission) Modal Usaha dibawah 50 Juta)	12
		Layanan Surat Rekomendasi Dan Surat Lainnya	313
		Layanan Administrasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)	66
		Layanan Izin Pelataran	0
		Layanan Administrasi Surat Keterangan Domisili	4
		Layanan Administrasi Surat Keterangan Pindah Penduduk	103
		Layanan Administrasi Surat Keterangan Waris	19
		Layanan Administrasi Surat Keterangan Telah Atau Belum melakukan pemotretan E-KTP	3
		Layanan Administrasi Surat Keterangan Hak Milik Tukang Kapal (PACAK)	17
		Layanan Administrasi Surat Keterangan Pengoperan Hak Tanah	1
Total			575

Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan)

Pengolahan data di <https://e-surveikpp.polmankab.go.id> dilaksanakan secara otomatis oleh sistem. Pengolahan nilai per unsur tidak dilakukan secara umum, tapi diolah per jenis layanan. Secara detail kami sajikan pengolahan data Pelayanan pada Kantor Kecamatan Tinambung menggunakan excel template olah data SKM pada <https://e-surveikpp.polmankab.go.id> sebagai berikut :

1. IKM pada Layanan Penertiban Dispensasi Nikah



PENERTIBAN DISPENSASI NIKAH
Periode : 01-01-2022 - 31-12-2022

no	u1	u2	u3	u4	u5	u6	u7	u8	u9
1	3	3	3	4	3	3	3	3	4
2	3	3	3	4	3	3	3	3	4
3	4	3	3	4	4	4	4	3	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4
6	4	3	4	4	3	3	4	4	4
7	4	4	3	4	3	4	4	3	4
8	4	4	3	4	4	4	4	4	4
9	3	3	3	4	3	3	3	3	4
10	3	3	3	4	3	3	3	3	4
11	3	3	3	4	3	3	3	3	4
12	3	3	3	4	3	3	4	4	4
13	3	3	4	4	3	3	3	4	4
14	3	3	4	4	3	3	3	4	4
15	3	3	3	4	3	3	3	3	4
16	3	3	3	4	3	3	3	3	4
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4
18	4	3	3	4	3	4	3	3	4
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4
20	4	4	3	4	4	3	4	4	4
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4
22	4	4	4	4	4	4	4	4	4
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Nilai/U	82	79	79	92	79	80	82	82	92
NRRT/U	3,565	3,435	3,435	4	3,435	3,478	3,565	3,565	4
NRRT/U	0,396	0,381	0,381	0,444	0,381	0,386	0,396	0,396	0,444

Jumlah NRRT/U : 3.605 ==> IKM Unit Pelayanan : 3.605 x 25= 90.13

Keterangan :

IKM = Indeks Kepuasan Masyarakat
 U1-U9 = Unsur-unsur pelayanan
 NRR = Nilai Rata-rata
 NRR/U = Jumlah nilai per unsur dibagi jumlah kuesioner yang terisi
 NRRT = Nilai Rata-rata Tertimbang
 NRRT/U = NRR/U x 0.111 per unsur

Mutu Pelayanan :

A (Sangat Baik) : 88.31 - 100.00
B (Baik) : 76.61 - 88.30
C (Kurang Baik) : 65.00 - 76.60
D (Tidak Baik) : 0 - 64.99

NO	UNSUR PELAYANAN	NRR
U1	Persyaratan	3.565
U2	Prosedur	3.435
U3	Waktu Pelayanan	3.435
U4	Biaya/Tarif	4.000
U5	Produk Layanan	3.435
U6	Kompetensi Pelaksana	3.478
U7	Perilaku Pelaksana	3.565
U8	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	3.565
U9	Sarana dan Prasarana	4.000

2. IKM pada Layanan Izin Imb (Ukuran Dibawah 50 M2)



Hasil Survei Layanan



PELAYANAN IZIN IMB (UKURAN DIBAWAH 50 M2)

Periode : 01-01-2022 - 31-12-2022

no	u1	u2	u3	u4	u5	u6	u7	u8	u9
1	3	3	2	4	3	3	3	4	3
2	3	4	4	3	4	4	4	4	4
3	3	3	3	4	3	3	3	3	4
4	4	3	3	4	3	4	4	3	4
Nilai/U	13	13	12	15	13	14	14	14	15
NRR/U	3,25	3,25	3	3,75	3,25	3,5	3,5	3,5	3,75
NRRT/U	0,361	0,361	0,333	0,416	0,361	0,389	0,389	0,389	0,416
Jumlah NRRT/U : 3.415 ==> IKM Unit Pelayanan : 3.415 x 25= 85.38									

$$\text{NRR/U} = \frac{\text{Jumlah nilai per unsur dibagi}}{\text{jumlah kuesioner yang terisi}}$$

$$\text{NRRT} = \text{Nilai Rata-rata Tertimbang}$$

$$\text{NRRT/U} = \text{NRR/U} \times 0.111 \text{ per unsur}$$

Mutu Pelayanan :

- A** (Sangat Baik) : 88.31 - 100.00
- B** (Baik) : 76.61 - 88.30
- C** (Kurang Baik) : 65.00 - 76.60
- D** (Tidak Baik) : 0 - 64.99

NO	UNSUR PELAYANAN	NRR
U2	Prosedur	3.250
U3	Waktu Pelayanan	3.000
U4	Biaya/Tarif	3.750
U5	Produk Layanan	3.250
U6	Kompetensi Pelaksana	3.500
U7	Perilaku Pelaksana	3.500
U8	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	3.500
U9	Sarana dan Prasarana	3.750

3. IKM pada Layanan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)



Hasil Survei Layanan

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)
TINAMBUNG
PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

📅 01-01-2022 Sampai 31-12-2022

<p>NILAI IKM</p> <div style="font-size: 2em; font-weight: bold; margin-top: 20px;">94.13</div>	<p>Nama Layanan : PELAYANAN IZIN USAHA MIKRO KECIL (IUMK)</p> <p style="text-align: center;">RESPONDEN</p> <p>JUMLAH : 10 orang JENIS KELAMIN : L= 6 orang / P= 4 orang PENDIDIKAN : SD = 0 orang SMP = 2 orang SMA = 7 orang S1 = 1 orang S2 = 0 orang S3 = 0 orang</p>
---	---

PELAYANAN IZIN USAHA MIKRO KECIL (IUMK)

Periode : 01-01-2022 - 31-12-2022

no	u1	u2	u3	u4	u5	u6	u7	u8	u9
1	3	3	3	4	3	4	4	4	4
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	3	3	3	4	3	3	3	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4
7	3	3	3	4	3	3	3	4	4
8	3	4	4	4	4	3	4	3	4
9	4	4	2	4	4	4	4	4	4
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Nilai/U	36	37	35	40	37	37	38	39	40
NRR/U	3,6	3,7	3,5	4	3,7	3,7	3,8	3,9	4
NRRT/U	0,4	0,411	0,389	0,444	0,411	0,411	0,422	0,433	0,444
Jumlah NRRT/U : 3.765 ==> IKM Unit Pelayanan : 3.765 x 25= 94.13									

Keterangan :

IKM = Indeks Kepuasan Masyarakat

U1-U9 = Unsur-unsur pelayanan

NRR = Nilai Rata-rata

$NRR/U = \frac{\text{Jumlah nilai per unsur dibagi}}{\text{jumlah kuesioner yang terisi}}$

NRRT = Nilai Rata-rata Tertimbang

$NRRT/U = NRR/U \times 0,111$ per unsur

Mutu Pelayanan :

A (Sangat Baik) : 88.31 - 100.00

B (Baik) : 76.61 - 88.30

C (Kurang Baik) : 65.00 - 76.60

D (Tidak Baik) : 0 - 64.99

NO	UNSUR PELAYANAN	NRR
U1	Persyaratan	3.600
U2	Prosedur	3.700
U3	Waktu Pelayanan	3.500
U4	Biaya/Tarif	4.000
U5	Produk Layanan	3.700
U6	Kompetensi Pelaksana	3.700
U7	Perilaku Pelaksana	3.800
U8	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	3.900
U9	Sarana dan Prasarana	4.000

4. IKM pada Layanan Izin Oss (Formulir Online Single Submission) Modal Usaha Dibawah 50 Juta



PELAYANAN IZIN OSS (FORMULIR ONLINE SINGLE SUBMISSION) MODAL USAHA DIBAWAH 50 JUTA
 Periode : 01-01-2022 - 31-12-2022

no	u1	u2	u3	u4	u5	u6	u7	u8	u9
1	3	3	4	4	3	4	4	3	4
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	3	4
5	4	3	4	3	3	4	4	4	4
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4
7	3	4	4	3	4	4	4	4	4
8	4	4	4	3	3	4	4	4	4
9	3	3	3	3	3	4	4	3	4
10	4	4	4	4	3	4	4	3	4
11	3	3	4	4	4	3	4	3	4
12	4	4	4	4	4	4	4	3	4
Nilai/U	44	44	47	44	43	47	48	41	48
NRRT/U	3,667	3,667	3,917	3,667	3,583	3,917	4	3,417	4
NRRT/U	0,407	0,407	0,435	0,407	0,398	0,435	0,444	0,379	0,444
Jumlah NRRT/U : 3.756 ==> IKM Unit Pelayanan : 3.756 x 25= 93.9									

Keterangan :

IKM = Indeks Kepuasan Masyarakat
 U1-U9 = Unsur-unsur pelayanan
 NRR = Nilai Rata-rata
 NRR/U = Jumlah nilai per unsur dibagi jumlah kuesioner yang terisi
 NRRT = Nilai Rata-rata Tertimbang
 NRRT/U = NRR/U x 0.111 per unsur

Mutu Pelayanan :

A (Sangat Baik) : 88.31 - 100.00
B (Baik) : 76.61 - 88.30
C (Kurang Baik) : 65.00 - 76.60
D (Tidak Baik) : 0 - 64.99

NO	UNSUR PELAYANAN	NRR
U1	Persyaratan	3.600
U2	Prosedur	3.700
U3	Waktu Pelayanan	3.500
U4	Biaya/Tarif	4.000
U5	Produk Layanan	3.700
U6	Kompetensi Pelaksana	3.700
U7	Perilaku Pelaksana	3.800
U8	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	3.900
U9	Sarana dan Prasarana	4.000

5. IKM pada Layanan Rekomendasi Surat dan Surat Lainnya



SURAT REKOMENDASI DAN SURAT LAINNYA										
Periode : 01-01-2022 - 31-12-2022										
no	u1	u2	u3	u4	u5	u6	u7	u8	u9	
1	3	3	3	4	3	3	3	4	4	4
2	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4
3	4	3	3	4	3	3	4	3	4	4
4	4	3	3	4	3	3	3	3	3	4
5	3	3	3	4	3	3	3	4	4	4
6	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4
7	4	3	3	4	4	3	4	4	4	4
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
10	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
13	3	3	3	4	4	4	4	3	4	4
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
15	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4
16	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4
17	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3
18	3	4	3	4	4	4	3	3	3	1
19	3	4	3	4	4	4	3	4	4	4
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
21	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4
22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
24	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4
25	4	3	4	4	3	3	4	3	3	4
26	4	4	3	4	3	4	3	4	4	4
27	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3
28	4	3	4	4	3	3	4	3	3	4
29	4	3	3	4	3	3	4	4	4	4
30	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4
31	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4
32	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4
33	3	3	3	4	3	3	4	3	3	4
34	3	3	3	4	3	3	4	3	3	4
35	3	4	4	4	3	4	4	3	3	4
36	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4
37	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4
38	3	4	3	4	4	3	3	3	3	4
39	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4
40	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4
41	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4
42	4	3	4	4	3	3	4	2	3	4
43	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4
44	3	3	3	4	3	4	4	4	4	4
45	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
46	3	3	4	4	3	3	4	4	4	4
47	3	4	3	4	3	3	4	4	4	4
48	4	3	3	4	3	3	3	3	3	4
49	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
50	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
51	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
52	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
53	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
54	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
55	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4
56	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4
57	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
58	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4
59	3	4	3	4	3	3	4	3	3	4
60	4	4	4	4	3	3	3	3	3	4
61	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4
62	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4
63	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
64	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4
65	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4

66	4	4	4	4	4	4	4	4	4
67	3	3	3	4	3	3	4	4	4
68	3	3	3	4	3	3	3	4	4
69	3	3	3	4	3	3	3	4	4
70	3	3	3	4	3	3	3	3	4
71	3	3	3	4	3	3	3	3	4
72	3	3	3	4	3	3	3	2	4
73	3	3	4	4	4	4	4	4	4
74	4	4	4	4	4	4	4	4	4
75	4	3	4	4	4	4	4	4	4
76	4	4	4	4	4	4	4	4	4
77	4	4	3	4	3	3	3	3	4
78	3	3	3	4	3	3	3	3	4
79	3	3	3	4	3	3	3	4	4
80	4	4	3	4	3	4	3	3	4
81	3	4	3	4	4	3	3	3	4
82	4	4	4	4	4	4	4	4	4
83	3	3	3	4	3	3	3	2	4
84	4	4	4	4	4	4	4	4	4
85	3	3	3	4	3	3	3	3	4
86	3	3	3	4	3	3	3	3	4
87	3	3	3	4	3	3	3	4	4
88	4	3	4	4	4	4	4	4	4
89	4	4	3	4	3	4	3	3	4
90	1	3	4	4	3	3	4	3	4
91	4	4	3	4	4	3	4	3	4
92	4	4	4	4	4	4	4	4	4
93	3	4	3	4	3	4	4	3	4
94	3	3	3	4	3	3	3	3	4
95	4	4	4	4	4	4	4	4	4
96	4	4	4	4	4	4	4	4	4
97	4	4	4	4	4	4	4	4	4
98	3	3	3	4	3	3	3	4	4
99	4	4	4	4	4	4	4	4	4
100	4	4	4	4	4	4	3	4	4
101	3	3	3	4	3	3	3	3	4
102	4	4	4	4	4	3	4	3	4
103	3	3	3	4	3	2	3	2	3
104	3	3	3	4	3	3	3	3	4
105	3	3	3	4	3	3	3	2	4
106	3	4	3	4	3	4	4	3	4
107	3	3	3	4	3	3	3	3	4
108	3	4	3	4	3	4	4	3	4
109	4	4	4	4	4	4	4	4	4
110	4	4	4	4	4	4	4	4	4
111	4	4	4	4	4	4	4	4	4
112	3	3	3	4	3	3	4	3	4
113	3	3	4	4	4	4	4	4	4
114	3	3	3	4	3	3	4	4	4
115	4	3	3	4	4	4	4	3	4
116	3	3	3	4	3	3	3	3	3
117	4	4	3	4	4	4	4	4	4
118	3	3	4	4	4	3	3	3	4
119	4	4	4	4	3	3	3	4	4
120	3	3	4	4	4	3	3	3	4
121	4	4	4	4	3	4	4	3	4
122	3	4	3	4	3	3	3	3	4
123	3	3	3	4	3	3	3	4	4
124	3	3	3	4	3	3	3	3	4
125	3	3	3	4	3	3	3	4	4
126	4	4	3	4	3	3	4	3	4
127	3	3	3	4	3	3	3	3	4
128	4	4	4	4	4	4	4	4	4
129	4	4	4	4	4	4	4	4	4
130	4	4	4	4	3	4	3	4	4
131	3	3	3	4	3	3	3	3	4
132	3	3	3	4	3	3	3	3	4
133	3	3	3	4	3	3	3	3	4
134	3	4	4	4	4	4	4	4	4

135	4	4	3	4	3	3	3	3	4
136	3	3	3	4	3	3	3	3	4
137	3	4	3	4	3	4	4	3	4
138	4	3	3	4	4	4	4	3	4
139	3	3	3	4	3	3	3	3	4
140	4	4	4	4	4	4	4	4	4
141	4	4	4	4	4	4	4	4	4
142	4	4	4	4	4	4	4	4	4
143	4	3	3	4	3	4	3	3	4
144	4	1	4	4	4	4	4	4	4
145	4	3	3	4	3	3	4	3	4
146	4	4	4	4	4	4	4	4	4
147	4	4	4	4	4	3	3	4	4
148	4	3	3	4	4	4	4	4	4
149	4	3	3	4	3	4	3	3	4
150	4	3	4	4	3	3	3	4	4
151	4	4	4	4	4	4	4	4	4
152	4	4	4	4	4	4	4	4	4
153	4	3	3	4	3	3	3	3	4
154	4	4	4	4	4	4	3	4	4
155	3	3	3	4	3	4	3	3	3
156	4	4	4	4	3	3	3	3	4
157	3	3	3	4	3	3	3	3	4
158	3	3	3	4	4	4	3	3	4
159	3	3	3	4	3	3	3	3	4
160	3	3	3	4	3	3	3	3	4
161	4	4	3	4	3	4	4	4	4
162	3	4	3	4	3	3	3	3	4
163	4	3	3	4	4	3	4	4	4
164	4	4	4	4	3	4	4	3	4
165	3	3	3	3	3	3	3	3	4
166	3	3	3	3	3	3	3	3	3
167	3	3	3	4	3	3	4	4	4
168	3	3	3	4	3	3	4	4	4
169	4	4	4	4	4	4	4	4	4
170	3	3	3	4	3	3	4	4	4
171	3	3	3	4	3	3	3	3	4
172	4	3	3	4	3	3	3	3	3
173	4	3	4	4	4	4	4	4	4
174	4	4	3	4	3	3	3	3	4
175	4	4	4	4	4	4	4	4	4
176	4	3	3	4	3	3	3	3	4
177	4	3	3	4	3	4	4	3	4
178	4	4	4	4	4	4	4	3	4
179	4	3	3	4	3	3	4	3	4
180	3	3	3	4	3	4	4	3	4
181	3	3	3	4	3	3	4	2	4
182	4	3	3	3	3	3	3	3	4
183	4	4	3	4	3	3	4	3	4
184	4	4	4	4	4	4	4	4	4
185	2	4	3	4	3	4	4	4	4
186	4	4	4	4	4	4	4	4	4
187	4	4	3	4	4	3	3	4	4
188	3	3	3	4	4	4	4	4	4
189	3	3	3	4	4	3	3	3	4
190	3	3	3	4	3	3	3	3	4
191	3	3	3	4	4	3	4	3	4
192	4	3	3	4	3	3	3	3	3
193	3	3	4	4	3	4	3	3	4
194	4	4	4	4	4	4	4	4	4
195	4	3	3	4	3	4	3	4	4
196	4	3	4	4	4	4	4	3	4
197	4	3	4	4	4	4	4	4	4
198	4	4	4	4	4	4	4	4	4
199	3	4	4	4	3	4	4	4	4
200	3	4	4	4	4	4	4	3	4
201	4	3	4	4	4	4	4	4	4
202	3	3	3	4	3	3	3	2	4
203	4	4	4	4	4	4	4	4	4

204	4	4	4	4	4	4	4	4	4
205	3	4	3	4	3	3	4	4	4
206	3	4	3	4	3	3	4	4	4
207	4	4	3	4	3	4	4	3	4
208	4	4	3	4	3	4	4	3	4
209	4	4	3	4	3	4	4	3	4
210	3	3	3	4	3	3	3	3	4
211	4	4	4	4	4	4	4	4	4
212	4	4	4	4	4	4	4	4	4
213	3	3	3	4	3	3	3	3	4
214	3	3	3	4	3	3	3	3	1
215	3	3	3	3	3	3	3	3	4
216	4	3	3	4	3	3	4	4	4
217	3	3	3	4	3	3	3	3	4
218	4	4	4	4	3	4	4	3	4
219	3	4	4	4	4	4	4	4	4
220	3	3	3	4	3	3	3	3	4
221	3	3	3	4	4	3	3	3	4
222	4	3	3	4	3	3	3	2	4
223	4	3	3	4	3	4	3	4	4
224	3	3	3	3	3	3	4	4	4
225	3	4	3	4	3	3	4	4	4
226	3	4	3	4	4	3	4	4	4
227	3	3	3	4	3	3	3	3	3
228	3	3	3	4	3	3	3	3	3
229	3	3	4	4	3	3	4	3	4
230	4	3	4	4	4	4	4	4	4
231	3	3	3	4	3	3	3	3	4
232	3	3	3	3	3	3	3	3	4
233	3	3	3	4	3	3	3	3	4
234	4	4	4	4	4	4	4	4	4
235	4	4	3	4	4	4	4	4	4
236	4	1	3	4	3	4	4	4	4
237	4	4	3	4	4	3	4	4	4
238	4	4	4	4	3	3	4	4	4
239	4	3	3	4	3	3	3	3	4
240	4	4	4	4	4	4	4	4	4
241	4	3	3	4	3	3	3	3	4
242	4	3	3	4	3	4	3	3	1
243	4	4	3	4	3	4	3	4	4
244	4	3	3	4	3	3	3	3	4
245	4	3	3	4	3	3	3	3	4
246	4	4	3	4	4	4	4	4	4
247	4	3	3	4	3	3	3	3	4
248	4	4	3	4	4	3	4	4	4
249	4	4	4	4	4	4	4	4	4
250	4	4	4	4	4	4	4	4	4
251	4	4	4	4	3	3	4	4	4
252	4	3	3	4	3	3	4	4	4
253	4	4	4	4	3	3	3	3	4
254	4	4	4	4	4	4	4	4	4
255	4	3	3	3	3	3	3	3	4
256	4	4	3	4	3	3	4	4	4
257	4	3	3	4	3	3	4	3	4
258	4	4	3	4	3	3	4	4	4
259	4	4	3	4	3	3	4	4	4
260	4	4	3	4	3	3	3	3	4
261	3	3	3	4	3	4	3	3	4
262	4	4	3	4	4	4	4	4	4
263	4	4	3	4	3	3	3	4	4
264	3	3	3	4	3	3	3	4	4
265	3	3	3	3	3	3	3	3	3
266	3	3	3	4	4	3	3	3	4
267	4	4	4	4	3	3	3	3	4
268	4	4	4	4	4	4	4	4	4
269	4	3	2	3	3	3	3	3	3
270	4	4	4	4	3	4	4	3	4
271	4	4	3	4	3	3	4	3	4
272	4	4	3	4	3	4	3	3	4

273	4	3	3	4	3	3	3	3	4
274	4	3	3	4	3	3	4	3	4
275	4	3	3	4	3	3	3	3	4
276	4	3	3	4	3	3	3	3	4
277	3	2	3	4	3	4	3	3	4
278	3	4	3	4	4	3	4	3	4
279	4	4	3	4	3	3	4	3	4
280	4	3	3	4	3	3	3	3	4
281	4	3	3	3	3	3	3	3	4
282	4	4	4	4	4	4	4	4	4
283	4	3	3	4	3	3	4	3	4
284	4	4	4	4	4	4	4	4	4
285	4	3	3	4	3	3	4	4	4
286	4	4	4	4	4	4	4	4	4
287	4	3	3	4	3	3	3	3	4
288	4	4	4	4	4	4	4	4	4
289	4	4	4	4	3	4	4	4	4
290	4	4	4	4	4	4	4	4	4
291	4	4	4	4	4	3	3	4	4
292	4	4	4	4	4	4	3	4	4
293	4	4	4	4	4	4	4	4	4
294	4	3	3	4	3	3	3	3	4
295	4	3	4	4	3	4	4	4	4
296	4	3	3	4	3	4	4	4	4
297	4	4	4	4	4	4	4	4	4
298	4	4	4	4	4	4	4	4	4
299	3	3	3	4	3	4	4	4	4
300	4	4	4	4	4	4	4	4	4
301	4	4	4	4	4	4	4	4	4
302	4	4	4	4	4	4	4	4	4
303	3	3	3	4	3	3	3	3	4
304	3	3	3	4	4	4	3	3	4
305	4	4	4	4	3	3	3	3	4
306	3	3	3	4	3	4	3	3	3
307	4	4	4	4	4	4	3	4	4
308	4	3	3	4	3	3	3	3	4
309	4	4	4	4	4	4	4	4	4
310	3	3	4	4	3	3	3	4	4
311	4	3	3	4	4	4	4	4	4
312	4	4	4	4	4	4	4	4	4
313	4	3	3	4	3	3	4	3	4
Nilai/U	1125	1083	1059	1241	1061	1082	1111	1086	1230
NRR/U	3,594	3,46	3,383	3,965	3,39	3,457	3,55	3,47	3,93
NRRT/U	0,399	0,384	0,376	0,44	0,376	0,384	0,394	0,385	0,436
Jumlah NRRT/U : 3.574 ==> IKM Unit Pelayanan : 3.574 x 25= 89.35									

Keterangan :

IKM = Indeks Kepuasan Masyarakat
 U1-U9 = Unsur-unsur pelayanan
 NRR = Nilai Rata-rata
 NRR/U = Jumlah nilai per unsur dibagi jumlah kuesioner yang terisi
 NRRT = Nilai Rata-rata Tertimbang
 NRRT/U = NRR/U x 0.111 per unsur

Mutu Pelayanan :

A (Sangat Baik) : 88.31 - 100.00
B (Baik) : 76.61 - 88.30
C (Kurang Baik) : 65.00 - 76.60
D (Tidak Baik) : 0 - 64.99

NO	UNSUR PELAYANAN	NRR
U1	Persyaratan	3.594
U2	Prosedur	3.460
U3	Waktu Pelayanan	3.383
U4	Biaya/Tarif	3.965
U5	Produk Layanan	3.390
U6	Kompetensi Pelaksana	3.457
U7	Perilaku Pelaksana	3.550
U8	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	3.470
U9	Sarana dan Prasarana	3.930

6. IKM pada Layanan Rekomendasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)



PELAYANAN ADMINISTRASI SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU (SKTM)
 Periode : 01-01-2022 - 31-12-2022

no	u1	u2	u3	u4	u5	u6	u7	u8	u9
1	3	3	4	4	4	4	4	4	4
2	3	3	3	4	4	3	3	3	4
3	4	4	4	4	4	3	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4
6	3	3	3	4	3	3	3	3	4
7	3	3	3	4	4	3	3	3	4
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4
9	3	3	3	4	3	4	4	4	4
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4
11	4	4	4	4	3	3	4	4	4
12	4	3	4	4	4	4	4	3	4
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4
14	3	2	4	4	4	4	4	4	4
15	3	3	3	4	3	3	3	3	4
16	4	3	3	4	3	3	1	3	3
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4
19	4	4	4	4	4	3	3	4	4
20	3	4	3	4	4	4	4	4	4
21	4	4	3	4	3	4	3	4	4
22	3	3	3	4	3	3	4	4	4
23	3	3	4	4	3	3	3	4	4
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4
26	3	3	3	4	4	3	3	4	4
27	3	4	3	4	3	3	3	3	3
28	3	3	3	4	3	4	3	4	4
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4
30	3	3	3	4	4	3	3	3	4

31	3	3	3	4	3	3	3	3	4
32	3	3	4	4	3	3	4	3	4
33	4	4	3	4	3	4	4	4	4
34	4	3	3	4	3	3	3	3	4
35	3	3	4	4	3	4	3	4	4
36	3	3	3	4	3	3	3	3	4
37	4	4	4	4	4	4	4	4	4
38	3	4	4	4	3	3	3	3	4
39	3	4	3	4	3	3	3	3	4
40	3	3	3	4	4	3	4	3	4
41	4	3	3	4	4	4	4	3	4
42	4	4	4	4	4	4	4	4	4
43	3	4	3	4	3	3	3	3	4
44	3	4	3	4	3	3	4	4	4
45	3	4	3	4	3	3	3	3	4
46	3	3	3	3	3	3	3	3	4
47	3	2	3	4	3	4	4	3	4
48	4	3	3	4	4	3	4	3	4
49	4	4	4	4	4	4	4	4	4
50	4	4	4	4	3	4	4	2	1
51	4	4	4	4	4	4	3	4	4
52	4	3	2	4	3	3	3	3	4
53	4	4	4	4	4	4	4	4	4
54	4	3	3	3	3	3	3	3	3
55	4	4	4	4	4	4	4	4	4
56	4	4	4	4	3	3	4	3	4
57	4	3	3	4	4	3	4	4	4
58	3	3	3	4	4	3	3	3	4
59	3	3	4	4	4	4	4	3	4
60	4	4	4	4	4	4	4	4	4
61	4	4	4	4	4	4	4	4	4
62	3	3	3	4	3	4	4	4	4
63	4	4	4	4	4	4	4	4	4
64	4	3	3	4	4	4	3	4	4
65	4	3	4	4	3	4	3	3	4
66	3	3	3	4	3	4	3	3	4
Nilai/U	234	229	230	262	231	235	234	234	258
NRR/U	3,545	3,47	3,485	3,97	3,5	3,561	3,545	3,545	3,909
NRRT/U	0,393	0,385	0,387	0,441	0,389	0,395	0,393	0,393	0,434
Jumlah NRRT/U : 3.61 ==> IKM Unit Pelayanan : 3.61 x 25= 90.25									

Keterangan :

IKM = Indeks Kepuasan Masyarakat
 U1-U9 = Unsur-unsur pelayanan
 NRR = Nilai Rata-rata
 NRR/U = Jumlah nilai per unsur dibagi jumlah kuesioner yang terisi
 NRRT = Nilai Rata-rata Tertimbang
 NRRT/U = NRR/U x 0.111 per unsur

Mutu Pelayanan :

A (Sangat Baik) : 88.31 - 100.00
B (Baik) : 76.61 - 88.30
C (Kurang Baik) : 65.00 - 76.60
D (Tidak Baik) : 0 - 64.99

NO	UNSUR PELAYANAN	NRR
U1	Persyaratan	3.545
U2	Prosedur	3.470
U3	Waktu Pelayanan	3.485
U4	Biaya/Tarif	3.970
U5	Produk Layanan	3.500
U6	Kompetensi Pelaksana	3.561
U7	Perilaku Pelaksana	3.545
U8	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	3.545
U9	Sarana dan Prasarana	3.909

7. IKM pada Layanan Izin Pelataran



Tinambung

Hasil Survei Layanan

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)
TINAMBUNG
PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

📅 01-01-2022 Sampai 31-12-2022

<p>NILAI IKM</p> <div style="font-size: 48px; font-weight: bold; margin: 20px 0;">0</div>	<p>Nama Layanan : PELAYANAN IZIN PELATARAN</p> <p>RESPONDEN</p> <p>JUMLAH : 0 orang JENIS KELAMIN : L= 0 orang / P= 0 orang PENDIDIKAN : SD = 0 orang SMP = 0 orang SMA = 0 orang S1 = 0 orang S2 = 0 orang S3 = 0 orang</p>
--	---

PELAYANAN IZIN PELATARAN
Periode : 01-01-2022 - 31-12-2022

no	u1	u2	u3	u4	u5	u6	u7	u8	u9
Nilai/U	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NRR/U	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NRRT/U	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah NRRT/U : 0 ==> IKM Unit Pelayanan : 0 x 25= 0									

Keterangan :

IKM = Indeks Kepuasan Masyarakat
 U1-U9 = Unsur-unsur pelayanan
 NRR = Nilai Rata-rata
 NRR/U = Jumlah nilai per unsur dibagi jumlah kuesioner yang terisi
 NRRT = Nilai Rata-rata Tertimbang
 NRRT/U = NRR/U x 0.111 per unsur

Mutu Pelayanan :

A (Sangat Baik) : 88.31 - 100.00
B (Baik) : 76.61 - 88.30
C (Kurang Baik) : 65.00 - 76.60
D (Tidak Baik) : 0 - 64.99

NO	UNSUR PELAYANAN	NRR
U1	Persyaratan	0
U2	Prosedur	0
U3	Waktu Pelayanan	0
U4	Biaya/Tarif	0
U5	Produk Layanan	0

NO	UNSUR PELAYANAN	NRR
U6	Kompetensi Pelaksana	0
U7	Perilaku Pelaksana	0
U8	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	0
U9	Sarana dan Prasarana	0

8. IKM pada Layanan Administrasi Surat Keterangan Domisili



PELAYANAN ADMINISTRASI SURAT KETERANGAN DOMISILI

Periode : 01-01-2022 - 31-12-2022

no	u1	u2	u3	u4	u5	u6	u7	u8	u9
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4
2	3	3	3	4	3	3	3	4	4
3	3	3	3	4	3	3	3	3	4
4	3	4	3	3	4	3	3	3	4
Nilai/U	13	14	13	15	14	13	13	14	16
NRRT/U	3,25	3,5	3,25	3,75	3,5	3,25	3,25	3,5	4
NRRT/U	0,361	0,389	0,361	0,416	0,389	0,361	0,361	0,389	0,444
Jumlah NRRT/U : 3.471 ==> IKM Unit Pelayanan : 3.471 x 25= 86.78									

NRR = Nilai Rata-rata
 NRR/U = Jumlah nilai per unsur dibagi jumlah kuesioner yang terisi
 NRRT = Nilai Rata-rata Tertimbang
 NRRT/U = NRR/U x 0.111 per unsur

Mutu Pelayanan :

A (Sangat Baik) : 88.31 - 100.00
B (Baik) : 76.61 - 88.30
C (Kurang Baik) : 65.00 - 76.60
D (Tidak Baik) : 0 - 64.99

NO	UNSUR PELAYANAN	NRR
U1	Persyaratan	3.250
U2	Prosedur	3.500
U3	Waktu Pelayanan	3.250
U4	Biaya/Tarif	3.750
U5	Produk Layanan	3.500
U6	Kompetensi Pelaksana	3.250
U7	Perilaku Pelaksana	3.250
U8	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	3.500
U9	Sarana dan Prasarana	4.000

9. IKM pada Layanan Administrasi Surat Keterangan Pindah Penduduk



PELAYANAN ADMINISTRASI SURAT KETERANGAN PINDAH PENDUDUK

Periode : 01-01-2022 - 31-12-2022

no	u1	u2	u3	u4	u5	u6	u7	u8	u9
1	3	3	3	4	3	3	3	4	4
2	4	3	3	4	3	3	4	3	4
3	4	3	4	4	4	4	4	3	4
4	4	3	3	4	3	3	4	3	4
5	3	3	3	4	3	3	3	3	4
6	3	3	3	4	3	3	3	3	4
7	4	4	4	4	3	3	4	3	4
8	4	3	3	4	4	3	4	4	4
9	3	4	3	4	3	3	3	4	4
10	4	3	3	4	3	4	4	3	4
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4
13	3	3	3	4	3	3	3	4	4
14	3	4	3	4	3	4	4	3	4
15	3	3	3	4	3	4	3	3	4
16	3	3	3	4	3	4	3	3	4
17	4	3	3	4	3	3	3	3	4
18	3	3	3	4	3	3	3	3	4
19	4	3	3	4	3	3	3	4	4
20	4	4	3	4	4	4	4	4	4
21	3	4	4	4	3	4	4	3	4
22	3	3	3	4	4	4	4	3	4
23	3	3	3	4	3	3	3	3	4
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4

25	3	3	3	4	3	3	4	3	4
26	3	3	3	4	3	3	3	3	4
27	3	2	4	4	3	4	4	4	4
28	3	4	3	4	3	4	4	3	4
29	4	4	3	4	4	4	4	4	4
30	4	3	3	3	3	3	3	3	4
31	3	3	3	4	3	3	3	3	4
32	4	3	4	4	4	4	4	3	4
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4
34	4	3	4	4	4	4	4	3	4
35	3	3	3	4	3	3	3	2	4
36	4	4	4	4	4	4	4	4	4
37	3	4	3	4	3	4	3	3	4
38	3	4	4	4	3	4	3	3	4
39	3	4	4	4	3	4	3	3	4
40	3	4	3	4	3	4	3	4	4
41	4	1	4	4	4	4	4	4	4
42	3	3	3	4	3	3	3	3	4
43	3	3	3	4	3	3	3	3	4
44	3	3	3	4	3	3	3	3	4
45	3	3	3	4	3	4	3	4	4
46	4	4	4	4	4	4	4	4	4
47	3	3	3	4	4	3	3	4	4
48	3	4	4	4	4	4	4	4	4
49	4	3	3	4	3	3	4	3	4
50	3	3	3	4	4	4	3	4	4
51	3	3	3	4	3	4	4	4	4
52	3	4	4	4	3	4	4	3	4
53	3	4	4	3	4	4	4	4	4
54	3	4	4	3	4	4	4	4	4
55	4	4	4	4	4	4	4	4	4
56	4	4	4	4	4	4	4	4	4
57	4	4	4	4	4	4	4	4	4
58	3	3	3	4	3	3	3	3	4
59	3	3	3	4	3	3	4	4	4
60	4	4	4	4	4	4	4	4	4
61	3	3	3	4	3	3	3	4	4
62	4	4	4	4	4	4	4	4	4
63	3	3	3	4	3	4	4	3	4
64	4	4	4	4	4	4	4	4	4
65	3	3	3	3	3	3	3	3	4
66	3	3	3	4	3	3	3	3	4
67	3	3	3	4	3	3	3	3	4
68	3	3	3	4	3	3	3	4	4
69	3	4	3	4	3	3	3	4	4
70	3	3	3	4	3	3	4	3	4
71	3	3	3	4	3	3	4	3	4
72	4	3	3	4	3	3	3	3	4
73	4	4	4	4	4	4	4	4	4
74	4	4	4	4	4	4	4	4	4
75	3	3	3	3	3	3	3	2	4
76	3	3	3	3	3	3	3	2	4
77	3	3	3	3	3	3	3	2	4
78	3	4	4	4	4	4	4	4	4
79	4	3	4	4	4	4	4	4	4
80	4	3	4	4	4	3	3	3	4

25	3	3	3	4	3	3	4	3	4
26	3	3	3	4	3	3	3	3	4
27	3	2	4	4	3	4	4	4	4
28	3	4	3	4	3	4	4	3	4
29	4	4	3	4	4	4	4	4	4
30	4	3	3	3	3	3	3	3	4
31	3	3	3	4	3	3	3	3	4
32	4	3	4	4	4	4	4	3	4
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4
34	4	3	4	4	4	4	4	3	4
35	3	3	3	4	3	3	3	2	4
36	4	4	4	4	4	4	4	4	4
37	3	4	3	4	3	4	3	3	4
38	3	4	4	4	3	4	3	3	4
39	3	4	4	4	3	4	3	3	4
40	3	4	3	4	3	4	3	4	4
41	4	1	4	4	4	4	4	4	4
42	3	3	3	4	3	3	3	3	4
43	3	3	3	4	3	3	3	3	4
44	3	3	3	4	3	3	3	3	4
45	3	3	3	4	3	4	3	4	4
46	4	4	4	4	4	4	4	4	4
47	3	3	3	4	4	3	3	4	4
48	3	4	4	4	4	4	4	4	4
49	4	3	3	4	3	3	4	3	4
50	3	3	3	4	4	4	3	4	4
51	3	3	3	4	3	4	4	4	4
52	3	4	4	4	3	4	4	3	4
53	3	4	4	3	4	4	4	4	4
54	3	4	4	3	4	4	4	4	4
55	4	4	4	4	4	4	4	4	4
56	4	4	4	4	4	4	4	4	4
57	4	4	4	4	4	4	4	4	4
58	3	3	3	4	3	3	3	3	4
59	3	3	3	4	3	3	4	4	4
60	4	4	4	4	4	4	4	4	4
61	3	3	3	4	3	3	3	4	4
62	4	4	4	4	4	4	4	4	4
63	3	3	3	4	3	4	4	3	4
64	4	4	4	4	4	4	4	4	4
65	3	3	3	3	3	3	3	3	4
66	3	3	3	4	3	3	3	3	4
67	3	3	3	4	3	3	3	3	4
68	3	3	3	4	3	3	3	4	4
69	3	4	3	4	3	3	3	4	4
70	3	3	3	4	3	3	4	3	4
71	3	3	3	4	3	3	4	3	4
72	4	3	3	4	3	3	3	3	4
73	4	4	4	4	4	4	4	4	4
74	4	4	4	4	4	4	4	4	4
75	3	3	3	3	3	3	3	2	4
76	3	3	3	3	3	3	3	2	4
77	3	3	3	3	3	3	3	2	4
78	3	4	4	4	4	4	4	4	4
79	4	3	4	4	4	4	4	4	4
80	4	3	4	4	4	3	3	3	4

81	3	4	4	4	4	4	4	4	4
82	3	4	3	4	3	3	3	3	4
83	4	4	4	4	4	4	4	4	4
84	4	3	3	4	3	3	3	3	4
85	4	4	4	4	4	4	4	4	4
86	3	3	3	4	3	4	3	3	4
87	4	4	4	4	3	4	4	4	4
88	4	4	3	4	3	3	3	3	4
89	4	4	4	4	4	3	4	3	4
90	4	4	4	4	4	4	4	4	4
91	4	3	3	3	3	3	3	3	3
92	4	4	4	4	4	4	4	4	4
93	4	4	4	4	4	4	4	4	4
94	4	4	3	4	4	3	4	4	4
95	3	3	3	4	4	3	3	3	4
96	3	3	3	4	4	3	3	3	4
97	4	4	4	4	4	4	4	4	4
98	3	3	3	4	3	3	3	3	4
99	4	4	4	4	4	4	4	4	4
100	4	4	4	4	3	4	4	3	4
101	3	3	2	4	3	3	3	2	4
102	4	3	4	4	4	4	4	4	4
103	3	3	3	4	3	3	3	3	4
Nilai/U	356	351	350	404	352	363	365	352	411
NRR/U	3,456	3,408	3,398	3,922	3,417	3,524	3,544	3,417	3,99
NRRT/U	0,384	0,378	0,377	0,435	0,379	0,391	0,393	0,379	0,443
Jumlah NRRT/U : 3.559 ==> IKM Unit Pelayanan : 3.559 x 25= 88.98									

Jumlah NRRT/U : 3.559

IKM Unit Pelayanan : 3.559 x 25= 88.98

Keterangan :

IKM = Indeks Kepuasan Masyarakat

U1-U9 = Unsur-unsur pelayanan

NRR = Nilai Rata-rata

NRR/U = $\frac{\text{Jumlah nilai per unsur dibagi}}{\text{jumlah kuesioner yang terisi}}$

NRRT = Nilai Rata-rata Tertimbang

NRRT/U = NRR/U x 0.111 per unsur

Mutu Pelayanan :

A (Sangat Baik) : 88.31 - 100.00

B (Baik) : 76.61 - 88.30

C (Kurang Baik) : 65.00 - 76.60

D (Tidak Baik) : 0 - 64.99

NO	UNSUR PELAYANAN	NRR
U1	Persyaratan	3.456
U2	Prosedur	3.408
U3	Waktu Pelayanan	3.398
U4	Biaya/Tarif	3.922
U5	Produk Layanan	3.417
U6	Kompetensi Pelaksana	3.524
U7	Perilaku Pelaksana	3.544
U8	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	3.417
U9	Sarana dan Prasarana	3.990

10. IKM pada Layanan Administrasi Surat Keterangan Waris



PELAYANAN ADMINISTRASI SURAT KETERANGAN WARIS

Periode : 01-01-2022 - 31-12-2022

no	u1	u2	u3	u4	u5	u6	u7	u8	u9
1	4	3	3	4	3	3	3	3	4
2	4	3	3	4	4	4	4	4	4
3	3	4	3	4	4	4	4	4	4
4	3	4	3	4	4	4	4	4	4
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4
6	3	3	3	4	3	3	3	3	4
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4
9	3	3	3	4	4	3	3	3	4
10	3	3	3	4	3	3	3	4	4
11	3	3	4	4	3	3	4	3	4
12	3	3	3	4	3	4	3	3	4
13	3	3	4	4	3	3	3	3	4
14	3	3	3	4	3	3	4	4	4
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4
16	3	3	3	4	3	4	4	4	4
17	3	3	4	4	3	3	4	4	4
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4
19	4	3	4	4	4	3	3	3	4
Nilai/U	65	64	66	76	67	67	69	69	76
NRR/U	3,421	3,368	3,474	4	3,526	3,526	3,632	3,632	4
NRRT/U	0,38	0,374	0,386	0,444	0,391	0,391	0,403	0,403	0,444
Jumlah NRRT/U : 3.616 ==> IKM Unit Pelayanan : 3.616 x 25= 90.4									

11. IKM pada Layanan Administrasi Surat Keterangan Waris



PELAYANAN ADMINISTRASI SURAT KETERANGAN WARIS

Periode : 01-01-2022 - 31-12-2022

no	u1	u2	u3	u4	u5	u6	u7	u8	u9
1	4	3	3	4	3	3	3	3	4
2	4	3	3	4	4	4	4	4	4
3	3	4	3	4	4	4	4	4	4
4	3	4	3	4	4	4	4	4	4
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4
6	3	3	3	4	3	3	3	3	4
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4
9	3	3	3	4	4	3	3	3	4
10	3	3	3	4	3	3	3	4	4
11	3	3	4	4	3	3	4	3	4
12	3	3	3	4	3	4	3	3	4
13	3	3	4	4	3	3	3	3	4
14	3	3	3	4	3	3	4	4	4
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4
16	3	3	3	4	3	4	4	4	4
17	3	3	4	4	3	3	4	4	4
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4
19	4	3	4	4	4	3	3	3	4
Nilai/U	65	64	66	76	67	67	69	69	76
NRR/U	3,421	3,368	3,474	4	3,526	3,526	3,632	3,632	4
NRRT/U	0,38	0,374	0,386	0,444	0,391	0,391	0,403	0,403	0,444
Jumlah NRRT/U : 3.616 ==> IKM Unit Pelayanan : 3.616 x 25= 90.4									

Keterangan :

IKM = Indeks Kepuasan Masyarakat
 U1-U9 = Unsur-unsur pelayanan
 NRR = Nilai Rata-rata
 NRR/U = Jumlah nilai per unsur dibagi jumlah kuesioner yang terisi
 NRRT = Nilai Rata-rata Tertimbang
 NRRT/U = NRR/U x 0.111 per unsur

Mutu Pelayanan :

A (Sangat Baik) : 88.31 - 100.00
B (Baik) : 76.61 - 88.30
C (Kurang Baik) : 65.00 - 76.60
D (Tidak Baik) : 0 - 64.99

NO	UNSUR PELAYANAN	NRR
U1	Persyaratan	3.421
U2	Prosedur	3.368
U3	Waktu Pelayanan	3.474
U4	Biaya/Tarif	4.000
U5	Produk Layanan	3.526
U6	Kompetensi Pelaksana	3.526
U7	Perilaku Pelaksana	3.632
U8	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	3.632
U9	Sarana dan Prasarana	4.000

12. IKM pada Layanan Administrasi Surat Keterangan Hak Milik Tukang Kapal (PACAK)



Hasil Survei Layanan

**INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)
 TINAMBUNG
 PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

📅 01-01-2022 Sampai 31-12-2022

NILAI IKM

88.48

**Nama Layanan : PELAYANAN
 ADMINISTRASI SURAT
 KETERANGAN HAK MILIK
 TUKANG KAPAL (PACAK)**

RESPONDEN

JUMLAH : 17 orang
 JENIS : L= 15 orang / P= 2
 KELAMIN : orang
 PENDIDIKAN : SD = 5 orang
 SMP = 4 orang
 SMA = 5 orang
 S1 = 2 orang
 S2 = 1 orang
 S3 = 0 orang

PELAYANAN ADMINISTRASI SURAT KETERANGAN HAK MILIK TUKANG KAPAL (PACAK)

Periode : 01-01-2022 - 31-12-2022

no	u1	u2	u3	u4	u5	u6	u7	u8	u9
1	3	3	3	4	4	3	3	4	4
2	3	4	4	4	4	3	4	4	4
3	3	3	3	4	3	3	3	3	4
4	4	3	3	4	3	3	3	3	4
5	3	4	3	4	4	4	4	3	4
6	3	4	3	4	4	4	4	4	4
7	3	3	3	4	3	3	3	3	4
8	3	3	3	4	3	4	3	3	4
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4
10	3	3	3	4	3	3	3	3	4
11	3	3	3	4	3	3	3	3	4
12	4	3	3	4	3	3	4	3	4
13	3	3	3	4	4	4	4	4	4
14	3	3	3	4	4	4	4	4	4
15	4	3	4	4	4	4	4	4	4
16	3	4	3	4	3	3	3	3	4
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Nilai/U	56	57	55	68	60	59	60	59	68
NRR/U	3,294	3,353	3,235	4	3,529	3,471	3,529	3,471	4
NRRT/U	0,366	0,372	0,359	0,444	0,392	0,385	0,392	0,385	0,444
Jumlah NRRT/U : 3.539 ==> IKM Unit Pelayanan : 3.539 x 25= 88.48									

Keterangan :


IKM = Indeks Kepuasan Masyarakat
 U1-U9 = Unsur-unsur pelayanan
 NRR = Nilai Rata-rata
 NRR/U = Jumlah nilai per unsur dibagi jumlah kuesioner yang terisi
 NRRT = Nilai Rata-rata Tertimbang
 NRRT/U = NRR/U x 0.111 per unsur

Mutu Pelayanan :

A (Sangat Baik) : 88.31 - 100.00
B (Baik) : 76.61 - 88.30
C (Kurang Baik) : 65.00 - 76.60
D (Tidak Baik) : 0 - 64.99

NO	UNSUR PELAYANAN	NRR
U1	Persyaratan	3.294
U2	Prosedur	3.353
U3	Waktu Pelayanan	3.235
U4	Biaya/Tarif	4.000
U5	Produk Layanan	3.529
U6	Kompetensi Pelaksana	3.471
U7	Perilaku Pelaksana	3.529
U8	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	3.471
U9	Sarana dan Prasarana	4.000

13. IKM pada Layanan Administrasi Surat Keterangan Pengoperan Hak Tanah

 **Tinambung**

Hasil Survei Layanan

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)
TINAMBUNG
PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

📅 01-01-2022. Sampai 31-12-2022

<p>NILAI IKM</p> <h1 style="margin: 0;">99.9</h1>	<p>Nama Layanan : PELAYANAN ADMINISTRASI SURAT KETERANGAN PENGOPERAN HAK TANAH</p> <p>RESPONDEN</p> <p>JUMLAH : 1 orang JENIS KELAMIN : L= 0 orang / P= 1 orang PENDIDIKAN : SD = 0 orang SMP = 0 orang SMA = 1 orang S1 = 0 orang S2 = 0 orang S3 = 0 orang</p>
--	---

PELAYANAN ADMINISTRASI SURAT KETERANGAN PENGOPERAN HAK TANAH
 Periode : 01-01-2022 - 31-12-2022

no	u1	u2	u3	u4	u5	u6	u7	u8	u9
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Nilai/U	4	4	4	4	4	4	4	4	4
NRRT/U	4	4	4	4	4	4	4	4	4
NRRT/U	0,444	0,444	0,444	0,444	0,444	0,444	0,444	0,444	0,444
Jumlah NRRT/U : 3.996 ==> IKM Unit Pelayanan : 3.996 x 25= 99.9									

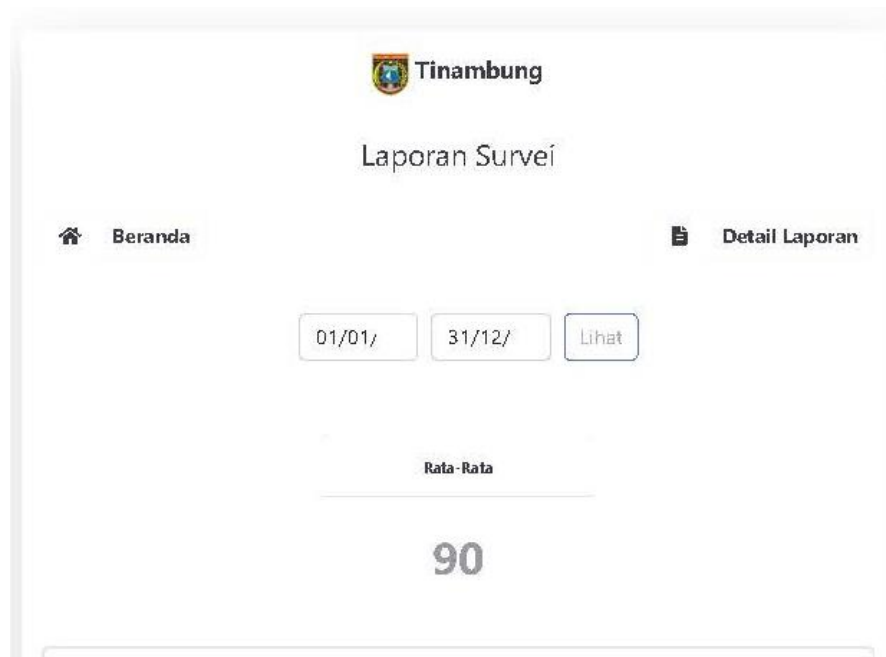
Keterangan :

- IKM = Indeks Kepuasan Masyarakat
- U1-U9 = Unsur-unsur pelayanan
- NRRT = Nilai Rata-rata
- NRRT/U = Jumlah nilai per unsur dibagi jumlah kuesioner yang terisi
- NRRT = Nilai Rata-rata Tertimbang

Mutu Pelayanan :

- A** (Sangat Baik) : 88.31 - 100.00
- B** (Baik) : 76.61 - 88.30
- C** (Kurang Baik) : 65.00 - 76.60
- D** (Tidak Baik) : 0 - 64.99

NO	UNSUR PELAYANAN	NRRT
U1	Persyaratan	4.000
U2	Prosedur	4.000
U3	Waktu Pelayanan	4.000
U4	Biaya/Tarif	4.000
U5	Produk Layanan	4.000
U6	Kompetensi Pelaksana	4.000
U7	Perilaku Pelaksana	4.000
U8	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	4.000
U9	Sarana dan Prasarana	4.000



Setelah membaca capaian hasil SKM dari tiga belas jenis pelayanan pada Kantor Kecamatan Tinambung periode Januari – Desember 2022, maka didapatkan hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Kantor Kecamatan Tinambung sebesar **90** (Sangat Baik) sebagaimana yang terbaca pada link web <https://e-surveikpp.polmankab.go.id>

3.6.1 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Pengguna Pelayanan Publik Perangkat Daerah

Kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan organisasi secara keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugas kemudian dibandingkan dengan berbagai kemungkinan seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan dan disepakati bersama. Kinerja dalam organisasi merupakan jawaban berhasil atau tidaknya tujuan organisasi. Organisasi dikategorikan memiliki perencanaan yang baik apabila nilai realisasi sesuai target yang dibuat.

Kecamatan Tinambung dalam menentukan Target dan Realiasi Kinerja mengacu pada Perjanjian Kinerja antara Camat dengan Bupati Polewali Mandar pada tahun 2022 melalui indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.25. Perbandingan Target dan Capaian Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Pengguna Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Sangat Baik (100)	Sangat Baik (90)

Indeks Kepuasan Masyarakat digunakan untuk mencapai target dari sasaran strategis Meningkatkan kualitas pelayanan publik pemerintah kecamatan di Wilayah Kecamatan Tinambung. Berdasarkan hasil perhitungan dari survei Kepuasan Masyarakat diperoleh nilai 90 dengan mutu Pelayanan “A” .

Realisasi IKM sebesar 90 diperoleh dari rata rata pengukuran indeks pelayanan sebagai berikut :

1. Pelayanan Layanan Penertiban Dispensasi Nikah 90,13.
2. Pelayanan Layanan Izin IMB (Ukuran dibawah 50 M2) 85,38
3. Pelayanan Layanan Izin Usaha Mikro Kecil 94,13
4. Pelayanan Layanan Izin OSS (Formulir Online Single Submission) Modal Usaha dibawah 50 Juta 93,9
5. Pelayanan Layanan Surat Rekomendasi dan Surat Lainnya 89,35
6. Pelayanan Layanan Administrasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) 90,25
7. Pelayanan Layanan Pelataran 0
8. Pelayanan Layanan Administrasi Surat Keterangan Domisili 86,78

9. Pelayanan Layanan Administrasi Surat Keterangan Pindah Penduduk 88,98
 10. Pelayanan Layanan Administrasi Surat Keterangan Waris 90,4
 11. Pelayanan Layanan Administrasi Surat Keterangan Telah atau Belum Melakukan Pemotretan E-KTP 82,33
 12. Pelayanan Layanan Administrasi Surat Keterangan Hak Milik Tukang Kapal (PACAK) 88,48
 13. Pelayanan Layanan Administrasi Surat Keterangan Pengoperan Hak Tanah 99,9
- Sehingga di peroleh rata rata realisasi IKM

$$X \text{ IKM Realisasi} = \frac{90,13 \quad 85,38 \quad 94,13 \quad 93,9 \quad 89,35 \quad 90,25 \quad 0 \quad 86,78 \quad 88,98 \quad 90,4 \quad 82,33 \quad 88,48 \quad 99,9}{12}$$

$$X \text{ IKM Realisasi} = \frac{1080,01}{12}$$

$$X \text{ IKM Realisasi} = 90$$

3.6.2 Perbandingan Capaian Tahun Ini dengan Tahun-tahun sebelumnya Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Pengguna Pelayanan Publik Perangkat Daerah

Realisasi Kinerja didefinisikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan oleh perangkat daerah untuk mencapai target yang telah direncanakan sebagai tujuan, sasaran dan indikator.

Capaian kinerja Kecamatan Tinambung dapat diartikan sebagai prosentase kinerja perangkat daerah terhadap indikator yang telah ditetapkan sesuai dengan Perjanjian Kinerja antara Camat Tinambung dan Bupati Polewali Mandar pada tahun 2022 Berikut disajikan lebih rinci perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya dan 2022 berdasarkan indikator yang telah ditetapkan “:

Pengukuran sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Kecamatan melalui indikator Indeks

Kepuasan Masyarakat selengkapnya dapat dilihat melalui data pada tabel berikut ini :

Tabel 3.26. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2020		2021		2022		Kenaikan / Penurunan Realisasi dari tahun sebelumnya
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Penurunan
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Pengguna Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Baik (88,30)	Baik (81,25)	Baik (88,30)	Baik (92,17)	Sangat Baik (100)	Sangat Baik (90)	Penurunan 2,17 POINT

Berdasarkan tabel tersebut di atas maka dapat diilustrasikan bahwa pada tahun 2022 mengalami performa penurunan capaian sebanyak 2,17 point dibanding tahun 2021.

3.6.3 Perbandingan Capaian Tahun Ini dan Tahun Akhir Renstra Indikator Kinerja Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Rencana Strategis adalah agenda yang disusun oleh organisasi sebagai hasil dari perencanaan kegiatan dan berfungsi sebagai peta rencana kegiatan dalam jangka 5 tahun Mengacu pada tujuan sasaran dan Indikator strategis Kecamatan Tinambung berikut disajikan perbandingan realisasi kinerja dengan target restra.

Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2022 adalah sebesar 90 % nilai tersebut tidak mencapai 100 % dari target yang telah ditetapkan Berikut disajikan perbandingan antara realisasi kinerja 2022 dengan target akhir renstra :

Tabel 3.27. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Restra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Restra	Capaian Tahun 2022
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Pengguna Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Sangat Baik (100)	Sangat Baik (90)

Berdasarkan Tabel tersebut di atas maka dapat dijelaskan bahwa target yang sudah ditetapkan di dalam Restra 100 % tidak tercapai sebagaimana realisasi pada tahun 2022 sebesar 90 % atau kurang 10 point dari target. Ini dipengaruhi tingkat target akhir restru sangat tinggi dibanding opini masyarakat yang menjadi objek survey memiliki pendapat yang beragam.

3.6.4 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Pengguna Pelayanan Publik Perangkat Daerah

<p>Faktor Penunjang :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Adanya Standar Operasional dan Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pelayanan Publik dan telah dilaksanakan oleh petugas pelayanan dengan baik b. Tersedianya kotak pengaduan pelayanan (kotak saran, web pengaduan dan email); c. Petugas pelayanan yang ramah, sopan dan santun dalam melayani masyarakat; 	<p>Faktor Penghambat :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kurangnya Kualitas SDM Aparatur Kecamatan. b. Jumlah PNS Kecamatan Tinambung sebanyak 35 orang, masih kurang jika dibandingkan dengan jumlah penduduk diwilayah Kecamatan Tinambung yang terdiri dari 7 Desa dan 1 Kelurahan Kurangnya Sarana dan Prasarana Pelayanan. c. Kurangnya Sarana dan Prasarana Pelayanan.
<p>Solusi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Diklat Tenaga Pelayanan Non PNS b. Perbaiki Sarana dan Prasarana Pelayanan; c. Meningkatkan pengetahuan/kemampuan SDM Aparatur Pelayanan Public; 	

3.6.5 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Pengguna Pelayanan Publik Perangkat Daerah

Sejumlah Program dan Kegiatan yang dialokasikan untuk memastikan terjaminnya pelayanan publik yang berkualitas, sebagai berikut :

Tabel 3.28.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Untuk IKM

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		2021			2022		
			Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran		Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	
				Jumlah (Rp)	%		Jumlah (Rp)	%
1	2		4	5	6	4	5	6
	Jumlah Anggaran		474.985.680,00	474.374.880,00	99,87	600.273.152,00	599.628.892,00	99,89
1	Program	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
1	Kegiatan	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10.300.000,00	10.300.000,00	100,00			
1	Sub Kegiatan	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	10.300.000	10.300.000	100,00			
2	Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	148.138.550,00	148.138.550,00	100,00	212.694.628,00	212.694.628,00	100,00
1	Sub Kegiatan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.800.850	2.800.850	100,00	4.225.000	4.225.000	100,00
2		Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	13.367.400	13.367.400	100,00	17.485.500	17.485.500	100,00
3		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	31.630.000	31.630.000	100,00	42.960.000	42.960.000	100,00
4		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.988.000	2.988.000	100,00	9.533.700	9.533.700	100,00
5		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.320.000	1.320.000	100,00	1.320.000	1.320.000	100,00
6		Penyediaan Bahan/Material	13.996.200	13.996.200	100,00	20.396.528	20.396.528	100,00
7		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	82.036.100	82.036.100	100,00	116.773.900	116.773.900	100,00
2	Kegiatan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	62.817.680,00	62.206.880,00	99,03	50.396.924,00	50.287.164,00	99,78
1	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	13.486.600	13.486.600	100,00	8.004.500	8.004.500	100,00
2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	34.936.080	34.325.280	98,25	23.631.024	23.521.264	99,54
3		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	14.395.000	14.395.000	100,00	18.761.400	18.761.400	100,00

Tabel 3.29.
Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 Untuk IKM

Sasaran	Kinerja			Anggaran			Keterangan
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Sangat Baik (100)	Sangat Baik (90)	90 %	Rp. 600.273.152	Rp. 599.628.892	99,89 %	3 Kegiatan

3.6.6 Analisis Efisiensi IKM

Tabel 3.30.
Capaian Kinerja 2022

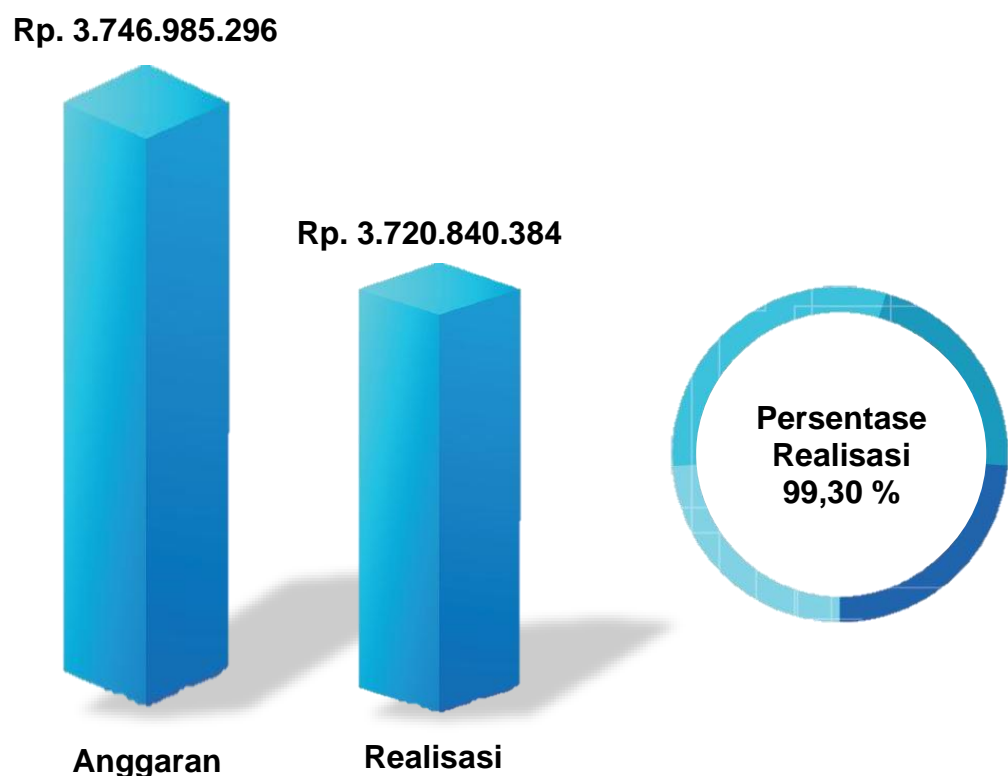
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	% Tingkat Efisiensi
2	3	4	5	6
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Pengguna Pelayanan Publik Perangkat Daerah	90 %	99,89 %	- 9,89 %

3.7 Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan dan ketaatan terhadap peraturan perundang – undangan dalam penggunaan sumber daya finansial. Laporan akuntabilitas kinerja yang baik harus disertai pula laporan akuntabilitas keuangan, sehingga efisiensi dan efektifitas penganggaran dapat diukur serta dapat diketahui nilai manfaat dari hasil program dan kegiatan yang dilaksanakan.

3.7.1 Anggaran Belanja Dan Realisasi Tahun Anggaran 2022

Adapun Anggaran dan Realisasi Belanja Kecamatan Tinambung Tahun 2022, dapat disajikan sebagai berikut:



3.7.2 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2022

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2022 yang dialokasikan untuk membiayai program / kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada **Tabel 3.31** berikut ini :

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		ANGGARAN		REALISASI		%
1	Program	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	3.251.927.296	Rp	3.225.782.663	99,20
1	Kegiatan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp	21.115.500	Rp	21.115.500	100,00
1.1	Sub Kegiatan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp	4.310.500	Rp	4.310.500	100,00
1.2		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp	11.534.300	Rp	11.534.300	100,00
1.3		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp	3.184.300	Rp	3.184.300	100,00
1.4		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp	2.086.400	Rp	2.086.400	100,00
2	Kegiatan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp	2.630.538.644	Rp	2.605.038.271	99,03
2.1	Sub Kegiatan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp	2.625.933.644	Rp	2.600.433.271	99,03
2.2		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp	4.605.000	Rp	4.605.000	100,00
3	Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp	212.694.628	Rp	212.694.628	100,00
3.1	Sub Kegiatan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp	4.225.000	Rp	4.225.000	100,00
3.2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp	17.485.500	Rp	17.485.500	100,00
3.3		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp	42.960.000	Rp	42.960.000	100,00
3.4		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp	9.533.700	Rp	9.533.700	100,00
3.5		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp	1.320.000	Rp	1.320.000	100,00
3.6		Penyediaan Bahan/Material	Rp	20.396.528	Rp	20.396.528	100,00
3.7		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp	116.773.900	Rp	116.773.900	100,00

4	Kegiatan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	50.396.924	Rp	50.287.164	99,78
4.1	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp	8.004.500	Rp	8.004.500	100,00
4.2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp	23.631.024	Rp	23.521.264	99,54
4.3		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp	18.761.400	Rp	18.761.400	100,00
5	Kegiatan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	337.181.600	Rp	336.647.100	99,84
5.1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		325.181.600		324.647.100	99,84
5.2		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		12.000.000		12.000.000	100,00
2	Program	Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik		325.296.950		325.296.950	100,00
1	Kegiatan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		197.178.350		197.178.350	100,00
1.1	Sub Kegiatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		19.317.750		19.317.750	100,00
1.2		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		177.860.600		177.860.600	100,00
2	Kegiatan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		128.118.600		128.118.600	100,00
2.1	Sub Kegiatan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Rp	14.118.600	Rp	14.118.600	100,00
2.2		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Rp	114.000.000	Rp	114.000.000	100,00
3	Program	Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan		169.760.771		169.760.771	100,00
1	Kegiatan	Pemberdayaan Kelurahan		169.760.771		169.760.771	100,00
1.1	Sub Kegiatan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Rp	169.760.771	Rp	169.760.771	100,00
Jumlah				3.746.985.017		3.720.840.384	99,30

3.7.3 Nilai Efisiensi Pada Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Kecamatan Tinambung Tahun Anggaran 2022

Tabel 3.32. Nilai Efisiensi pada Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Tahun 2022

No	Sasaran Strategis dan Indikator	Target	Capaian	%	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%	% Efisiensi	Keterangan
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Kecamatan	Sangat Baik (100)	Sangat Baik (90)	90,00	Rp 495.057.721	Rp 495.057.721	100,00	-10,00	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
	Indeks Kepuasan Layanan Pemerintah Kecamatan								Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	B (70)	B (70)	100,00	Rp 21.115.500	Rp 21.115.500	100,00	0,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
	Predikat SAKIP Perangkat Daerah								
3	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	100% (WTP)	100% (WTP)	100,00	Rp 2.630.538.644	Rp 2.605.038.271	99,03	0,97	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
	Persentase Tertib Pengolahan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah								
4	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Sangat Baik (100)	Sangat Baik (90)	90,00	Rp 600.273.152	Rp 599.628.892	99,89	-9,89	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
	Indeks Kepuasan Pengguna Pelayanan Publik Perangkat Daerah								
Jumlah				95,00	Rp 3.746.985.017	Rp 3.720.840.384	99,73	-4,73	

Mencermati rata-rata realisasi kinerja Kecamatan Tinambung Tahun 2022 sebesar 95,00 %, maka hal ini menunjukkan kurang efisiennya penggunaan dana sebesar -4,73 %. Penggunaan Anggaran yang terealisasi 99,73 % telah mampu menghasilkan rata-rata kinerja 95,00 %.

BAB IV

P E N U T U P

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tinambung menyajikan capaian sasaran strategis perangkat Daerah Tahun 2022. Di dalam penyajian ini diuraikan realisasi kinerja yang dibandingkan dengan target yang telah diperjanjikan, dibandingkan dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya serta perbandingan dengan target jangka menengah (Tahun 2024) yang tertuang di dalam dokumen Renstra 2019-2024. Selanjutnya diuraikan pula faktor penunjang keberhasilan, kendala yang masih dihadapi serta alternative solusi yang telah diupayakan. Laporan ini tentu dilengkapi pula dengan uraian akuntabilitas keuangan dan nilai efisiensi yang mampu dicapai atas kinerja yang dicapai.

Capaian kinerja Kecamatan Tinambung Tahun 2022, secara keseluruhan dapat dinyatakan "**BERHASIL**". Hal ini ditunjukkan dengan Rata-rata Pencapaian Kinerja sasaran strategis Kecamatan Tinambung sebesar 95,00 % serta Realisasi Keuangan sebesar 99,73 %. Kondisi ini memperlihatkan Kecamatan Tinambung belum, berhasil melakukan efisiensi penggunaan dana sebesar -4,73%.

4.1 Keberhasilan dan Kegagalan Kinerja

Dalam rangka mencapai kinerja sasaran selama Tahun 2022, Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar telah melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai Sasaran Strategisnya. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan analisisnya diperoleh gambaran mengenai capaian kinerja secara keseluruhan, yakni dari 2 (dua) Sasaran Strategis dan 4 (empat) Indikator Kinerja yang telah ditetapkan, diketahui bahwa 3 (tiga) Indikator Kinerja mencapai target kinerja "Sangat Baik", 1 (satu) Indikator Kinerja mencapai target kinerja "Baik"

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja sasaran strategis tersebut diatas didukung oleh 3 program, 8 kegiatan dan 23 sub kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2022.

4.2 Kendala dan Hambatan dalam Pencapaian Kinerja

Pada Tahun 2022 terdapat kendala dan hambatan yang dihadapi dalam upaya pencapaian Sasaran Strategis Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar yaitu, ketidaksesuaian antar dokumen perencanaan dan dokumen pelaporan ditambah lagi kondisi infrastruktur Gedung sarana dan prasarana pelayanan yang sudah tidak memadai.

4.3 Strategi Pemecahan Masalah

Dalam menghadapi kendala dan hambatan yang ada, Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar akan Menyesuaikan setiap dokumen perencanaan dan dokumen pelaporan dan selalu berusaha memperbaiki sarana dan prasarana pelayanan, dan melayani dengan baik dan senang hati

Camat Tinambung,

Hamzah Ismail, S.Pd.

Pangkat : Pembina

Nip. 19660407 198602 1 007

L
A
M
P
I
R
A
N



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
KECAMATAN TINAMBUNG

Jalan Poros Majene Kecamatan Tinambung, Kode Pos 91354
Website : <http://perangkatdaerah.polmankab.go.id/Tinambung>
Email : kectinambung@polmankab.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KECAMATAN TINAMBUNG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **HAMZAH ISMAIL, S.Pd.**

Jabatan : Camat Tinambung

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **H. ANDI IBRAHIM MASDAR**

Jabatan : Bupati Polewali Mandar

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tinambung, 21 Maret 2022

Pihak Kedua

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Pihak Pertama

CAMAT TINAMBUNG,

H. ANDI IBRAHIM MASDAR

HAMZAH ISMAIL, S.Pd.

Pangkat : Pembina

NIP. 19660407 198602 1 007

**PERJAJIAN KINERJA TAHUN 2022
KECAMATAN TINAMBUNG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2021	TARGET 2022
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik Pemerintah kecamatan	Indeks Kepuasan Layanan Pemerintahan Kecamatan	Baik	Sangat Baik
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	DD	B
		Persentase Tertib Pengolahan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah	100%	100%
		Indeks Kepuasan Pengguna Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Baik	Sangat Baik

No.	PROGRAM	ANGGARAN	KET
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 3.273.600.467	APBD
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp 316.912.650	APBD
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp 167.816.200	APBD
	JUMLAH	Rp 3.758.329.317	APBD

Tinambung, 21 Maret 2022

Pihak Kedua
BUPATI POLEWALI MANDAR,

Pihak Pertama
CAMAT TINAMBUNG,



H. ANDI IBRAHIM MASDAR

HAMZAH ISMAIL, S.Pd

Pangkat : Pembina.

NIP. 19660407 198602 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
KECAMATAN TINAMBUNG

Jalan Poros Majene Kecamatan Tinambung, Kode Pos 91354
Website : <http://perangkatdaerah.polmankab.go.id/Tinambung>
Email : kectinambung@polmankab.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KECAMATAN TINAMBUNG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **NILAWATI, S.E, M.M.**

Jabatan : Sekretaris Camat Tinambung

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **HAMZAH ISMAIL, S.Pd.**

Jabatan : Camat Tinambung

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tinambung, 21 Maret 2022

Pihak Kedua
Camat Tinambung,

Pihak Pertama
Sekretaris Camat Tinambung,

HAMZAH ISMAIL, S.Pd.
Pangkat : Pembina
NIP. 19660407 198602 1 007

NILAWATI, S.E., M.M.
Pangkat : Penata Tk.I
NIP. 19770607 200312 2 008

**PERJAJIAN KINERJA TAHUN 2022
KECAMATAN TINAMBUNG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2021	TARGET 2022
1	Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat/Stakeholder	Baik	Sangat Baik
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	B	BB
3	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Opini Pengelolaan Keuangan	WTP	WTP

No.	KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 22.035.500	APBD
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 2.651.882.943	APBD
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 194.839.628	APBD
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 67.660.796	APBD
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 337.181.600	APBD
	JUMLAH	Rp 3.273.600.467	APBD

Tinambung, 21 Maret 2022

Pihak Kedua
Camat Tinambung,

Pihak Pertama
Sekretaris Camat Tinambung,




HAMZAH ISMAIL, S.Pd.
Pangkat : Pembina
NIP. 19660407 198602 1 007

NILAWATI, S.E., M.M.
Pangkat : Penata Tk.I
NIP. 19770607 200312 2 008



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
KECAMATAN TINAMBUNG

Jalan Poros Majene Kecamatan Tinambung, Kode Pos 91354
Website : <http://perangkatdaerah.polmankab.go.id/Tinambung>
Email : kectinambung@polmankab.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
URUSAN KEUANGAN, PERENCANAAN DAN PELAPORAN
SEKRETARIAT KECAMATAN TINAMBUNG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MARMI, S.E.**

Jabatan : Kasubag. Keuangan, Perencanaan Dan Pelaporan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **NILAWATI, S.E., M.M.**

Jabatan : Sekretaris Camat Tinambung

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tinambung, 21 Maret 2022

Pihak Kedua
Sekretaris Camat Tinambung,

Pihak Pertama
Kasubag. Keuangan, Perencanaan dan
Pelaporan,

NILAWATI, S.E., M.M.

Pangkat : Penata Tk.I.

NIP. 19770607 200312 2 008

MARMI, S.E.

Pangkat : Penata

NIP. 19840429 201001 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
URUSAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN DAN PELAPORAN
SEKRETARIAT KECAMATAN TINAMBUNG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2021	TARGET 2022
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja	Jumlah Dokumen Renja/Perubahan Renja Tahunan yang Tersusun Sesuai Standar dan Tepat waktu	4 Dokumen	4 Dokumen
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang Tersusun Sesuai Standar dan Tepat waktu	4 Dokumen	4 Dokumen
		Jumlah Laporan Pejabat dengan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen
		Jumlah ASN yang masuk dalam Daftar/Ampra Gaji bulanan dalam satu tahun	35 Orang	35 Orang
2	Meningkatnya kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Monev	4 Dokumen	4 Dokumen
		Jumlah Dokumen Laporan Akhir Tahun Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen

No.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 4.310.500	APBD
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp 11.534.300	APBD
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 3.184.300	APBD
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 3.006.400	APBD
5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 2.647.277.943	APBD
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 4.605.000	APBD
	JUMLAH	Rp 2.673.918.443	

Tinambung, 21 Maret 2022

Pihak Kedua
 Sekretaris Camat Tinambung,

Pihak Pertama
 Kasubag. Keuangan, Perencanaan dan
 Pelaporan,



NILAWATI, S.E., M.M.
 Pangkat : Penata Tk.I.
 NIP. 19770607 200312 2 008



MARMI, S.E.
 Pangkat : Penata
 NIP. 19840429 201001 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
KECAMATAN TINAMBUNG

Jalan Poros Majene Kecamatan Tinambung, Kode Pos 91354
Website : <http://perangkatdaerah.polmankab.go.id/Tinambung>
Email : kectinambung@polmankab.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
URUSAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
SEKRETARIAT KECAMATAN TINAMBUNG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **NAHDIATI ATJO ABDOEL LATIEF, S.E.**
Jabatan : Kasubag Umum dan Kepegawaian
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **NILAWATI, S.E., M.M.**
Jabatan : Sekretaris Camat Tinambung
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tinambung, 21 Maret 2022

Pihak Kedua
Sekretaris Camat Tinambung,

Pihak Pertama
Kasubag Umum dan Kepegawaian,

NILAWATI, S.E., M.M.
Pangkat : Penata Tk.I.
NIP. 19770607 200312 2 008

NAHDIATI ATJO ABDOEL LATIEF, S.E.
Pangkat : Penata Muda Tk.I
NIP. 19661128 201412 2 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
URUSAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
SEKRETARIAT KECAMATAN TINAMBUNG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2021	TARGET 2022
	Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan bangunan kantor yang digunakan	4 jenis	4 jenis
		Jumlah unit Peralatan dan Perlengkapan kantor yang tersedia	6 unit	6 unit
		Jumlah paket Bahan Logistik yang tersedia	4 jenis	4 jenis
		Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang dibutuhkan dalam satu tahun	2 Jenis	2 Jenis
		Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang tersedia	1 jenis	1 jenis
		Jumlah Barang dan atau infrastruktur penunjang kantor yang terbentuk karena ketersediaan bahan/material	25 jenis	25 jenis
		Jumlah laporan koordinasi dan konsultasi SKPD	290 laporan	290 laporan
		Jumlah Surat Yang Terkelola	4000 surat	4000 surat
		Jumlah tagihan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	2 Jenis	2 Jenis
		Jumlah tempat pelayanan umum kantor yang dibayarkan jasa layanan	1 layanan	1 layanan
		Jumlah unit Kendaraan Dinas yang terpelihara	8 unit	8 unit
		Jumlah Kendaraan Dinas Yang Dilengkapi surat izin	8 unit	8 unit
		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang rusak ringan/sedang yang dilakukan pemeliharaan/rehabilitasi	26 unit	26 unit

No.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 4.225.000	APBD
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 17.485.500	APBD
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 36.085.000	APBD
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 9.533.700	APBD
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp 1.320.000	APBD
6	Penyediaan Bahan/Material (ATK)	Rp 20.396.528	APBD
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 105.793.900	APBD
8	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 8.004.500	APBD
9	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 40.894.896	APBD
10	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Jasa Kebersihan Kantor)	Rp 18.761.400	APBD
11	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 325.181.600	APBD
12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Rp 12.000.000	APBD
	JUMLAH	Rp 599.682.024	

Tinambung, 21 Maret 2022

Pihak Kedua
Sekretaris Camat Tinambung,



NILAWATI, S.E., M.M.
Pangkat : Penata Tk.I.
NIP. 19770607 200312 2 008

Pihak Pertama
Kasubag Umum dan Kepegawaian,



NAHDIATI ATJO ABDOEL LATIEF, S.E.
Pangkat : Penata Muda Tk.I
NIP. 19661128 201412 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
KECAMATAN TINAMBUNG

Jalan Poros Majene Kecamatan Tinambung, Kode Pos 91354
Website : <http://perangkatdaerah.polmankab.go.id/Tinambung>
Email : kectinambung@polmankab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SEKSI PEREKONOMIAN, PEMBANGUNAN DAN PENDAPATAN
KECAMATAN TINAMBUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **NURDIANTI, S.E.**
Jabatan : Kepala Seksi Ekbang dan Pendapatan
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **HAMZAH ISMAIL, S.Pd.**
Jabatan : Camat Tinambung
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tinambung, 21 Maret 2022

Pihak Kedua
Camat Tinambung,

Pihak Pertama
Kepala Seksi Perekonomian,
Pembangunan dan Pendapatan,

HAMZAH ISMAIL, S.Pd.
Pangkat : Pembina
NIP. 19660407 198602 1 007

NURDIANTI, S.E.
Pangkat : Penata
NIP. 19771231 201101 2 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SEKSI PEREKONOMIAN, PEMBANGUNAN DAN PENDAPATAN
KECAMATAN TINAMBUNG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2021	TARGET 2022
1	Meningkatnya kualitas Pelayanan publik Pemerintahan Kecamatan	Jumlah jenis Perizinan yang diterbitkan	50 izin	50 izin
		Jumlah Jenis Layanan	3 jenis	3 jenis

No.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan Perizinan Non Usaha	Rp 14.118.600	APBD
2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	Rp 114.000.000	APBD
	JUMLAH	Rp 128.118.600	

Tinambung, 21 Maret 2022

Pihak Kedua
Camat Tinambung,

Pihak Pertama
Kepala Seksi Perekonomian,
Pembangunan dan Pendapatan,




HAMZAH ISMAIL, S.Pd.
Pangkat : Pembina
NIP. 19660407 198602 1 007

NURDIANTI, S.E.
Pangkat : Penata
NIP. 19771231 201101 2 004



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
KECAMATAN TINAMBUNG

Jalan Poros Majene Kecamatan Tinambung, Kode Pos 91354
Website : <http://perangkatdaerah.polmankab.go.id/Tinambung>
Email : kectinambung@polmankab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KECAMATAN TINAMBUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SRIBUYUNG, S.E.**
Jabatan : Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **HAMZAH ISMAIL, S.Pd.**
Jabatan : Camat Tinambung
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tinambung, 21 Maret 2022

Pihak Kedua
Camat Tinambung,

Pihak Pertama
Kepala Seksi Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa,

HAMZAH ISMAIL, S.Pd.
Pangkat : Pembina
NIP. 19660407 198602 1 007

SRIBUYUNG, S.E.
Pangkat : Penata Tk.I
NIP. 19651231 200901 2 010

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KECAMATAN TINAMBUNG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2021	TARGET 2022
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik Pemerintah Kecamatan	Jumlah desa/kelurahan yang dimonitoring	8 desa/ kelurahan	8 desa/ kelurahan
		Jumlah kegiatan koordinasi yang diselenggarakan	150 orang	150 orang

No.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1	Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Rp 19.317.750	APBD
	JUMLAH	Rp 19.317.750	

Tinambung, 21 Maret 2022

Pihak Kedua
Camat Tinambung,

Pihak Pertama
Kepala Seksi Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa,



HAMZAH ISMAIL, S.Pd.
Pangkat : Pembina
NIP. 19660407 198602 1 007



SRIBUYUNG, S.E.
Pangkat : Penata Tk.I
NIP. 19651231 200901 2 010



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
KECAMATAN TINAMBUNG

Jalan Poros Majene Kecamatan Tinambung, Kode Pos 91354
Website : <http://perangkatdaerah.polmankab.go.id/Tinambung>
Email : kectinambung@polmankab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SEKSI TATA PEMERINTAHAN
KECAMATAN TINAMBUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ERWIN, S.IP.**
Jabatan : Kepala Seksi Tata Pemerintahan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **HAMZAH ISMAIL, S.Pd.**
Jabatan : Camat Tinambung

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tinambung, 21 Maret 2022

Pihak Kedua
Camat Tinambung,

Pihak Pertama
Kepala Seksi Tata Pemerintahan,

HAMZAH ISMAIL, S.Pd.
Pangkat : Pembina
NIP. 19660407 198602 1 007

ERWIN, S.IP.
Pangkat : Penata Muda Tk.I
NIP. 19750404 200701 1 022

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SEKSI TATA PEMERINTAHAN
KECAMATAN TINAMBUNG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2021	TARGET 2022
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik Pemerintah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	2 kegiatan	2 kegiatan

No.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Rp 167.816.200	APBD
	JUMLAH	Rp 167.816.200	

Tinambung, 21 Maret 2022

Pihak Kedua
Camat Tinambung,

Pihak Pertama
Kepala Seksi Tata Pemerintahan,



HAMZAH ISMAIL, S.Pd.
Pangkat : Pembina
NIP. 19660407 198602 1 007



ERWIN, S.IP.
Pangkat : Penata Muda Tk.I
NIP. 19750404 200701 1 022



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
KECAMATAN TINAMBUNG

Jalan Poros Majene Kecamatan Tinambung, Kode Pos 91354
Website : <http://perangkatdaerah.polmankab.go.id/Tinambung>
Email : kectinambung@polmankab.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SEKSI KETERTIBAN DAN KETENTRAMAN
KECAMATAN TINAMBUNG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MUHAMMAD YUSUF, S.Pd.I**
Jabatan : Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **HAMZAH ISMAIL, S.Pd.**
Jabatan : Camat Tinambung

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tinambung, 21 Maret 2022

Pihak Kedua
Camat Tinambung,

Pihak Pertama
Kepala Seksi Ketentraman dan
Ketertiban,

HAMZAH ISMAIL, S.Pd.
Pangkat : Pembina
NIP. 19660407 198602 1 007

MUHAMMAD YUSUF, S.Pd.I
Pangkat : Penata Tk.I
NIP. 19641231 198703 1 379

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
KECAMATAN TINAMBUNG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2021	TARGET 2022
1	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Kecamatan	Jumlah konflik yang ditangani	5 Konflik	5 Konflik

No.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET
	JUMLAH	Rp -	

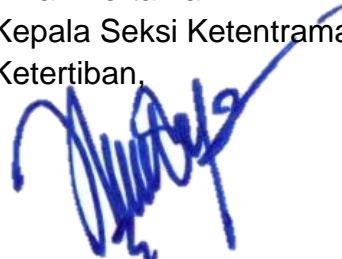
Tinambung, 21 Maret 2022

Pihak Kedua
Camat Tinambung,



HAMZAH ISMAIL, S.Pd.
Pangkat : Pembina
NIP. 19660407 198602 1 007

Pihak Pertama
Kepala Seksi Ketentraman dan
Ketertiban,



MUHAMMAD YUSUF, S.Pd.I
Pangkat : Penata Tk.I
NIP. 19641231 198703 1 379



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
KECAMATAN TINAMBUNG

Jalan Poros Majene Kecamatan Tinambung, Kode Pos 91354
Website : <http://perangkatdaerah.polmankab.go.id/Tinambung>
Email : kectinambung@polmankab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL, PENDIDIKAN DAN KESEHATAN
KECAMATAN TINAMBUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MARSAH, S.Sos.**

Jabatan : Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Pendidikan dan Kesehatan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **HAMZAH ISMAIL, S.Pd.**

Jabatan : Camat Tinambung

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tinambung, 21 Maret 2022

Pihak Kedua
Camat Tinambung,

Pihak Pertama
Kepala Seksi Kesos, Pendidikan dan
Kesehatan,

HAMZAH ISMAIL, S.Pd.

Pangkat : Pembina

NIP. 19660407 198602 1 007

MARSAH, S.Sos.

Pangkat : Penata Tk.I.

NIP. 19671231 199603 2 014

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL, PENDIDIKAN DAN KESEHATAN
KECAMATAN TINAMBUNG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2021	TARGET 2022
1	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Kecamatan	Jumlah Jenis Even Festival Budaya yang diikuti	1 jenis	1 jenis
		Jumlah kegiatan : keagamaan, pemberdayaan perempuan dan kepemudaan yang diselenggarakan	4 kegiatan	4 kegiatan

No.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	Rp 169.476.300	
	JUMLAH	Rp 169.476.300	

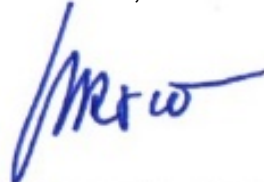
Tinambung, 21 Maret 2022

Pihak Kedua
Camat Tinambung,



HAMZAH ISMAIL, S.Pd.
Pangkat : Pembina
NIP. 19660407 198602 1 007

Pihak Pertama
Kepala Seksi Kesos, Pendidikan dan Kesehatan,



MARSAH, S.Sos.
Pangkat : Penata Tk.I.
NIP. 19671231 199603 2 014